

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(002)**



**LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018
*Audited***

JL. JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 22 April 2019
Sekretaris Jenderal DPR RI



Indra Iskandar
NIK: 19661114 1997031 001

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	2
II. Neraca	3
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	5
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	6
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	13
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	54
VI. Lampiran dan Daftar	



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

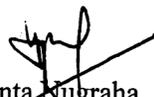
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2018 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 22 April 2019
Inspektur Utama


Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP.19620719 198803 1 001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 22 April 2019

Sekretaris Jenderal DPR RI



Indra Iskandar

NIP. 19661114 199703 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018

Realisasi Pendapatan Negara s.d 31 Desember 2018 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9.157.778.346,00 atau mencapai 466,53 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.962.945.000,00

Realisasi Belanja Negara s.d 31 Desember 2018 sebesar Rp4.603.672.520.480,00 atau mencapai 80,37 persen dari estimasi Belanja sebesar Rp5.728.286.667.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.427.559.444.172,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp23.811.341.791,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.368.303.738.179,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp35.375.709.202,00. Sedangkan Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.461.009.886,00 dan Rp1.422.098.434.286,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.517.213.110,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4.590.814.029.381,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai -Rp4.586.296.816.271,00. Terdapat Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.186.205.087,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar -Rp4.583.110.611.184,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp1.409.731.081.066,00, ditambah Defisit-LO sebesar -Rp4.583.110.611.184,00, kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan senilai Rp963.222.270,00 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar senilai Rp0,00 serta transaksi antar entitas senilai total Rp4.594.514.742.134,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp1.422.098.434.286,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018		% thd Anggaran	31 DESEMBER 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B1	1.962.945.000	9.157.778.346	466,53	9.291.868.626
JUMLAH PENDAPATAN		1.962.945.000	9.157.778.346	466,53	9.291.868.626
BELANJA					
Belanja Operasi	B2				
Belanja Pegawai	B3	1.094.013.410.000	1.016.368.546.497	92,90	991.035.135.608
Belanja Barang	B4	3.960.697.605.000	3.409.935.811.365	86,09	3.027.520.677.684
Belanja Modal	B5	673.575.652.000	177.368.162.618	26,33	167.614.128.859
JUMLAH BELANJA		5.728.286.667.000	4.603.672.520.480	80,37	4.186.169.942.151

Jakarta, 22 April 2019
 Sekretaris Jenderal DPR RI

 Indra Gunawan
 NIP. 19661114 199703 1 001

II. NERACA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

		(DALAM RUPIAH)	
ASET	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak	C1	600.181.033	493.439.437
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C3	(15.375.905)	(24.890.698)
Piutang Bukan Pajak Netto		584.805.128	468.548.739
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C2	-	250.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C3	-	(1.250.000)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		-	248.750.000
Persediaan	C4	23.226.536.663	18.560.434.078
Persediaan Belum Diregister		-	-
JUMLAH ASET LANCAR		23.811.341.791	19.277.732.817
ASET TETAP			
Tanah	C5	188.409.157.000	188.409.157.000
Peralatan dan Mesin	C6	1.320.157.553.414	1.188.424.521.149
Gedung dan Bangunan	C7	907.534.052.443	885.368.481.115
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C8	90.637.956.944	85.649.875.877
Aset Tetap Lainnya	C9	19.832.817.868	19.238.192.079
Akumulasi Penyusutan	C10	(1.158.267.799.490)	(1.002.107.920.260)
JUMLAH ASET TETAP		1.368.303.738.179	1.364.982.306.960
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	C11	216.000.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	C13	(210.030.000)	-
<i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>		<i>5.970.000</i>	<i>-</i>
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C12	<i>63.000.000</i>	<i>-</i>
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C13	(315.000)	-
<i>Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)</i>		<i>62.685.000</i>	<i>-</i>
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		68.655.000	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C14	47.375.876.247	41.851.828.145
Aset Lain-lain	C15	18.627.927.252	16.513.703.434
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C16	(30.628.094.297)	(26.094.771.637)
JUMLAH ASET LAINNYA		35.375.709.202	32.270.759.942
JUMLAH ASET		1.427.559.444.172	1.416.530.799.719
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C17	99.388.158	2.359.840.672
Pendapatan Diterima Dimuka	C18	5.361.621.728	4.439.877.981
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		5.461.009.886	6.799.718.653
JUMLAH KEWAJIBAN		5.461.009.886	6.799.718.653
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C19	1.422.098.434.286	1.409.731.081.066
JUMLAH EKUITAS		1.422.098.434.286	1.409.731.081.066
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.427.559.444.172	1.416.530.799.719

Jakarta, 22 April 2019
 Sekretaris Jenderal DPR RI

 Tedra S. Andar
 NIP. 19661041997031001

III. LAPORAN OPERASIONAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D1	4.517.213.110	3.386.799.512
JUMLAH PENDAPATAN		4.517.213.110	3.386.799.512
BEBAN			
Beban Pegawai	D2	1.016.046.667.347	990.754.506.900
Beban Persediaan	D3	38.333.105.454	37.203.329.756
Beban Barang dan Jasa	D4	2.260.367.360.266	2.017.552.961.394
Beban Pemeliharaan	D5	146.932.372.972	125.524.169.071
Beban Perjalanan Dinas	D6	956.260.502.667	845.509.106.977
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D7	2.425.714.500	3.687.054.250
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D8	170.248.725.968	152.158.895.731
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D9	199.580.207	139.407
Beban Lain-Lain			
JUMLAH BEBAN		4.590.814.029.381	4.172.390.163.486
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.586.296.816.271)	(4.169.003.363.974)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.778.506.408	1.111.325.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		83.522.407	491.202.987
SURPLUS/DEFISIT DARI PELEPASAN ASET NON LAN		1.694.984.001	620.122.013
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya		1.620.791.027	4.935.982.812
Beban Dari Kegiatan Non Operasional lainnya		129.569.941	2.359.062.388
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		1.491.221.086	2.576.920.424
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D10	3.186.205.087	3.197.042.437
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISI DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.583.110.611.184)	(4.165.806.321.537)

Jakarta, 22 April 2019
 Sekretaris Jenderal DPR RI

 Indra Suardar
 NIP. 196611141997031001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
EKUITAS AWAL	E1	1.409.731.081.066	1.398.950.805.617
SURPLUS/DEFISIT LO	E2	(4.583.110.611.184)	(4.165.806.321.537)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	E3	963.222.270	(291.476.539)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E3	660.571.556	(290.436.539)
Lain-lain	E4	302.650.714	(1.040.000)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E5	4.594.514.742.134	4.176.878.073.525
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E6	12.367.353.220	10.780.275.449
EKUITAS AKHIR	E7	1.422.098.434.286	1.409.731.081.066

Jakarta, 22 April 2019
 Sekretaris Jenderal DPR RI

 Indra Gunadarmas
 NIP. 19661114 199703 1 001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen dengan Visi "terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang kredibel dalam mengembeng tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah langkah strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif, dengan tujuan:
 - 1). Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang independen dan professional melalui kekuasaan pembentukan Undang-undang dan pelaksanaan fungsi legislasi
 - 2). Terbangunnya kapasitas DPR RI yang mumpuni dalam pembentukan Undang-undang yang berkualitas
 - 3). Tercapainya kelembagaan DPR RI yang mantap dalam pelaksanaan fungsi legislasi.
2. Mewujudkan fungsi penyelenggaraan negara yang akuntabel dan transparan dan efektif dengan tujuan:
 - 1). Terwujudnya politik anggaran yang akuntabel dan transparan;
 - 2). Terbangunnya kapasitas DPR RI dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai kebutuhan masyarakat;
 - 3). Tercapainya tata kelola kedewanan yang terpercaya dalam pelaksanaan fungsi anggaran.
3. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif, dengan tujuan:
 - 1). Terwujudnya citra DPR RI yang kuat melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan berkualitas;
 - 2). Terwujudnya penyelenggaraan system pengawasan yang mumpuni dalam rangka terciptanya system ketatanegaraan yang baik (good governance);
 - 3). Tercapainya kinerja pengawasan DPR RI yang akuntabel sebagai bentuk transparansi lembaga perwakilan kepada masyarakat;
 - 4). Tercapainya tata kelola kedewanan yang terpercaya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
4. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif dan akomodatif dengan tujuan:
 - 1). Terwujudnya lembaga perwakilan yang kuat dalam memperjuangkan aspiratif masyarakat;
 - 2). Terwujudnya kelembagaan DPR RI yang aspiratif melalui peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat yang efektif dan berkualitas;
 - 3). Tercapainya kapasitas DPR RI yang akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat;

- 4). Tercapainya kinerja DPR RI yang optimal dalam pelaksanaan tugas konstitusional melalui penyelenggaraan hak-hak keuangan dan administrasi Dewan;
- 5). Terwujudnya penegakan Tata Tertib dan Kode Etik sehingga tercipta kelancaran kerja DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya;

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terdiri atas Dua Eselon I, yaitu Eselon I Sekretariat Jenderal dan Eselon I Dewan. Masing Masing Eselon I hanya memiliki satu satuan kerja, yaitu satuan kerja Sekretariat Jenderal dan Satuan Kerja Dewan.

Pendekatan Penyusunan
Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pendapatan LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
 - * Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - * Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.

Pelaksanaan Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI

Selama periode berjalan, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan antara

- 1 Adanya kebutuhan mendesak dan belum dialokasikan anggarannya untuk memenuhi amanat UU nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berupa penambahan 1 Wakil Ketua DPR dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara berdasarkan surat Plt Sekjen yang ditujukan kepada DJA nomor SJ/05647/SETJEN DPR RI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018
- 2 Adanya tunggakan/tagihan pihak ketiga tahun anggaran 2017 yang belum terbayar sebesar Rp471.222.140,00 yang mendapat persetujuan Kuasa Penggunaan Anggaran dan telah direviu oleh APIP
- 3 Dalam rangka memenuhi prioritas kebutuhan dan mempercepat pencapaian kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Program Pelaksanaan Fungsi DPR dan Program Penguatan Kelembagaan serta Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI
- 4 Terdapat perubahan anggaran antar kegiatan, dari kegiatan fungsi legislasi menjadi kegiatan fungsi pengawasan dan perubahan anggaran yang disebabkan adanya penambahan output pada Rancangan Undang-Undang Usul DPR

Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Pegawai	1.094.013.410.000	1.094.013.410.000
Belanja Barang	3.959.028.543.000	3.960.800.653.000
Belanja Modal	675.244.714.000	673.472.604.000
Jumlah Belanja	5.728.286.667.000	5.728.286.667.000

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	1.649.326.092.000	1.649.326.092.000
Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	3.186.215.901.000	3.186.215.901.000
Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	841.643.223.000	841.643.223.000
Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	51.101.451.000	51.101.451.000
Jumlah Belanja	5.728.286.667.000	5.728.286.667.000

Realisasi Pendapatan
Rp9.157.778.346,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.157.778.346,00. Estimasi Pendapatan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.962.945.000,00

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) Serta Pendapatan dari Penjualan	1.962.945.000	7.463.720.617	380,231
Pendapatan Bunga, Pengelolaan	-	41.000.000	100,000
Pendapatan Lain-Lain	-	1.625.189.367	100,000
Total	1.962.945.000	9.157.778.346	466,533

Realisasi s.d 31 Desember 2018 melebihi estimasi pendapatan yang disebabkan oleh adanya pendapatan sewa PNBP yang berasal dari sewa wisma DPR RI di Kopo serta PNBP yang berasal dari pemanfaatan area gedung perkantoran DPR RI dan penerimaan yang bersumber dari penjualan/pelepasan aset. Selain itu terdapat pendapatan lain-lain yang bersumber dari pengembalian kelebihan belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) serta pembayaran denda keterlambatan atas sewa PNBP yang merupakan tindak lanjut atas temuan BPK pada audit Laporan Keuangan TA 2017.

Selanjutnya Realisasi Pendapatan s.d 31 Desember 2018 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan s.d 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar -1,44 persen. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada pendapatan lain-lain yang bersumber dari pengembalian kelebihan belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) serta pembayaran denda keterlambatan atas sewa PNBP yang merupakan tindak lanjut atas temuan BPK pada audit Laporan Keuangan TA 2017.

Perbandingan Realisasi Pendapatan s.d 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) Serta Pendapatan dari Penjualan	7.463.720.617	6.557.892.218	13,81
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	41.000.000	-	0,00
Pendapatan Lain-Lain	1.625.189.367	2.591.953.968	-37,30
Total	9.157.778.346	9.291.868.626	-1,44

Dalam Pendapatan Lain-lain, terdapat penyetoran atas kelebihan Tunjangan Kinerja dan Uang Makan yang telah dicatat pada 31 Desember 2017 dengan rincian:

No	NTPN	Jumlah
1.	B80D44LGEP8PA93P	Rp192.631.158
2.	B80D44LGEP8PA93P	Rp5.561.430
3	F5DC875BGF344V8P	Rp6.062.333
4.	B80D44LGEP8PA93P	Rp11.226.550
	Total	Rp215.481.471

Setoran pendapatan akun 425934 merupakan setoran pnbp yang dilakukan langsung oleh PT Taspen Persero sebesar Rp90.028.600,00 (Rincian Terlampir). Setoran tersebut terjadi sebagai akibat adanya potongan kewajiban atas pegawai dan Anggota DPR RI yang telah pensiun.

Setoran akun 425913 merupakan pengembalian belanja modal tahun anggaran sebelumnya, antara lain adanya pembayaran kekurangan volume pekerjaan perbaikan ruang media center lantai 1 gedung nusantara III DPR RI, pekerjaan pemasangan penutup lantai gedung mekanik, pembuatan pagar pembatas, pembuatan jalan taman area belakang, perbaikan ruang sekretariat gedung nusantara III, pembuatan ruang rapat biro umum, pemasangan kanopi membran pool kendaraan, serta pekerjaan renovasi toilet gedung nusantara III.

Pada akun 425912 terdapat setoran pengembalian belanja yang merupakan kelebihan pembayaran pembelian BBM tahun anggaran yang lalu sebesar Rp75.238.650,00 yang disetorkan dengan NTPN 1F10A45BEDKIJMPP. Atas kelebihan pembayaran ini, telah dilakukan penyesuaian pada Laporan Keuangan DPR RI TA 2017.

Realisasi Belanja
Rp4.603.672.520.480,00

B.2 BELANJA

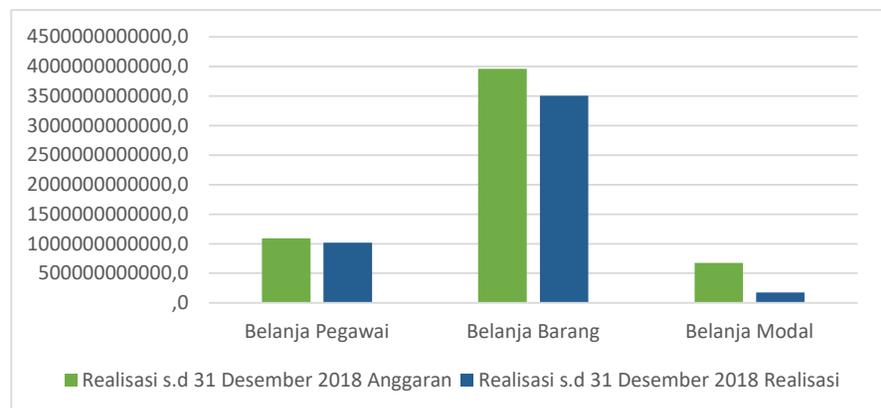
Realisasi Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia s.d 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.603.672.520.480,00 atau sebesar 80,37 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.728.286.667.000,00.

Rincian Estimasi Belanja dan Realisasi Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	1.094.013.410.000	1.017.429.192.083	93,00
Belanja Barang	3.960.697.605.000	3.503.337.901.003	88,45
Belanja Modal	673.575.652.000	177.368.162.618	26,33
Total Belanja Kotor	5.728.286.667.000	4.698.135.255.704	82,02
Pengembalian Belanja	-	94.462.735.224	100,00
Total Belanja	5.728.286.667.000	4.603.672.520.480	80,37

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program s.d 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Program	Realisasi s.d 31 Desember 2018		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	1.649.326.092.000	1.041.617.522.571	63,15
Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	3.186.215.901.000	2.983.122.173.077	93,63
Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	841.643.223.000	532.330.582.112	63,25
Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	51.101.451.000	46.602.242.620	91,20
Total Belanja	5.728.286.667.000	4.603.672.520.380	80,37

Realisasi Belanja s.d 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 9,97 persen jika dibandingkan dengan periode s.d 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada Tahun Anggaran 2017 ini, terdapat pembayaran gaji ke-14 (THR) Bagi Tenaga Ahli, Asisten Pribadi dan Staf Khusus Anggota sesuai dengan PMK 55 Tahun 2018. Pemberian THR Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan akibat penambahan komponen tunjangan kedalam Pembayaran THR.
2. Terdapat kenaikan pada hampir seluruh unsur belanja barang mulai dari belanja barang operasional, belanja persediaan, hingga peningkatan pada belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Perbandingan Realisasi Belanja s.d 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.016.368.546.497	991.035.135.608	2,56
Belanja Barang	3.409.935.811.365	3.027.520.677.684	12,63
Belanja Modal	177.368.162.618	167.614.128.859	5,82
Total	4.603.672.520.480	4.186.169.942.151	9,97

Pada tanggal pelaporan, diketahui adanya keterlambatan pemrosesan penagihan belanja di Kementerian Keuangan yang menyebabkan 5 (lima) Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp471,222,140,00 gagal terbayar. Kelima tagihan tersebut merupakan tagihan atas belanja barang, dan telah diakui dalam kewajiban lancar tahun ini dan telah dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2018. Selain itu, terdapat kekurangan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp8.806.145,00

Adapun rincian tagihan yang gagal terbayar pada TA 2017 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Kekurangan Pembayaran Tunkin TA 2017	Rp8.806.145
CV Karunia Alam Hijau (Pencetakan BK ASP Vol 8 No 2 Tahun 2017)	Rp54.120.000
CV Diyan Tirtayasa (5%) Belanja Pemeliharaan Gedung	Rp9.720.050
PT Mora Telematika Indonesia (Termin IV Pembayaran Internet Colocation)	Rp84.240.000
CV Karunia Alam Hijau (Pencetakan BK JNH Vol 8 No 2)	Rp54.120.000
PT Malibu Lancar Abadi (Termin XVI Fixed Price Pemeliharaan Wisma Kopo)	Rp269.022.090
Total	Rp480.028.285

Atas kekurangan pembayaran tunkin TA 2017 sebesar Rp8.806.145,00 telah dilakukan pembayaran pada bulan Februari 2018 dengan menggunakan SP2D nomor 181821302002429. Rincian Penyelesaian Tagihan pihak ketiga dijelaskan sebagai berikut:

No	Akun (No SPM)	Jumlah	Keterangan
1	522111 (02250)	84.240.000	PT Mora Telematika Indonesia (Termin IV Pembayaran Internet Colocation)
2	521811 (02393)	54.120.000	CV Karunia Alam Hijau (Pencetakan BK ASP Vol 8 No 2 Tahun 2017)
3	522111 (02394)	54.120.000	CV Karunia Alam Hijau (Pencetakan BK JNH Vol 8 No 2)
4	523129 (02896)	9.692.363	PT Malibu Lancar Abadi (Termin XVI Fixed Price Pemeliharaan Wisma Kopo)
5	521211 (02896)	259.329.727	PT Malibu Lancar Abadi (Termin XVI Fixed Price Pemeliharaan Wisma Kopo)
6	523121 (04277)	9.720.050	CV Diyan Tirtayasa (5%) Belanja Pemeliharaan Gedung
	Total	471.222.140	

Selain kekurangan belanja yang telah diidentifikasi sendiri, terdapat penambahan belanja barang yang masih harus dibayar pada laporan keuangan DPR RI per 31 Desember 2017 yang disebabkan adanya temuan BPK. Rincian Penambahan belanja barang yang masih harus dibayar tahun 2017 antara lain:

No	Akun	Jumlah	Keterangan
1	522111	1.726.173.172	Langganan Listrik
2	522112	153.639.215	Langganan Telepon
	Total	1.879.812.387	

Atas temuan tersebut telah dilakukan koreksi laporan keuangan DPR RI TA 2017. Berdasarkan informasi serta dokumen sumber yang diperoleh, atas kedua belanja barang tersebut telah dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban langganan listrik dibayarkan dengan SP2D No 181821302000999 tanggal 26 Januari 2018
2. Beban langganan telepon dibayarkan dengan SP2D No 181821301000278 tanggal 25 Januari 2018

Belanja Pegawai
Rp1.016.368.546.497,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai s.d 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing masing sebesar Rp1.016.368.546.497,00 dan Rp991.035.135.608,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2,56 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Pada tahun anggaran 2018, DPR RI melakukan pemberian Gaji Ke-14 untuk Anggota DPR RI, Pegawai, Tenaga Ahli, Staf Administrasi dan Staf Khusus Pimpinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018. Pemberian THR pada tahun ini mengalami peningkatan yang disebabkan adanya perubahan komponen Tunjangan yang sudah mengikutsertakan tunjangan bagi Anggota, PNS dan Tenaga Ahli
2. Selain pemberian Gaji ke 14, terdapat penambahan besaran tunjangan Kinerja yang disebabkan adanya penyesuaian Grade yang disebabkan adanya Pengangkatan Pejabat Baru serta penambahan tenaga Fungsional di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain itu, terdapat penambahan tenaga cpns baru sejumlah 55 pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai s.d 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	87.757.601.485	86.078.856.886	1,95
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	307.216.810.567	300.945.331.941	2,08
Belanja Honorarium	486.937.783.712	472.431.288.261	3,07
Belanja Lembur	7.542.540.233	7.229.293.650	4,33
Belanja Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito	127.974.456.086	124.732.357.548	2,60
Jumlah Belanja Kotor	1.017.429.192.083	991.417.128.286	2,62
Pengembalian Belanja	1.060.645.586	381.992.678	177,66
Jumlah Belanja	1.016.368.546.497	991.035.135.608	2,56

Selama Tahun Anggaran 2018, terdapat pembayaran belanja pegawai yang merupakan tunggakan belanja tahun anggaran 2017 sebesar Rp8.806.145,00 yang merupakan pembayaran atas kekurangan tunjangan kinerja kepada Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI, yang dibayarkan dengan SPM No 00109 tertanggal 7 Februari 2018

Belanja Barang
Rp3.409.935.811.365,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang s.d 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing masing sebesar Rp3.409.935.811.365,00 dan Rp3.027.520.677.684,00 atau mengalami kenaikan sebesar 12,63 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- 1 Terdapat peningkatan pada belanja perjalanan dinas luar negeri sebagai akibat meningkatnya jumlah anggota yang melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang dan pengumpulan data terkait Undang-undang.
- 2 Terdapat peningkatan terhadap belanja jasa yang disebabkan adanya peningkatan belanja honor untuk pegawai tidak tetap (PPNPN) serta peningkatan kegiatan diskusi dewan dengan narasumber dalam rangka penyusunan RRU dan menjaring aspirasi masyarakat.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang s.d 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.958.852.484.594	1.760.868.788.242	11,24
Belanja Barang Non Operasional	216.358.367.684	172.434.222.612	25,47
Belanja Barang Persediaan	45.986.553.475	44.971.198.886	2,26
Belanja Jasa	88.480.041.742	82.685.197.808	7,01
Belanja Pemeliharaan	144.992.294.753	122.611.050.212	18,25
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	671.675.099.342	570.625.900.490	17,71
Belanja Perjalanan Luar Negeri	376.993.059.413	358.510.986.017	5,16
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	165.000.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	3.503.337.901.003	3.112.872.344.267	12,54
Pengembalian Belanja	93.402.089.638	85.351.666.583	9,43
Jumlah Belanja	3.409.935.811.365	3.027.520.677.684	12,63

Pada tahun anggaran 2017, diketahui adanya keterlambatan pemrosesan penagihan belanja di Kementerian Keuangan yang menyebabkan 5 (lima) Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp471,222,140,00 gagal terbayar. Atas kegagalan pembayaran tersebut, berdasarkan hasil Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Nomor IT/206/ST.N-PKPT/IRTU/04/2018 tertanggal 16 April 2018, dapat dibayarkan pada TA 2018. Kelima tagihan tersebut telah berhasil ditagihkan pada tahun anggaran 2018, dengan rincian:

No	Akun (No SPM)	Jumlah	SP2D
1	522111 (02250)	84.240.000	181821302036053
2	521811 (02393)	54.120.000	181821303029992
3	522111 (02394)	54.120.000	181821303029991
4	523129 (02896)	9.692.363	181821302037554
4	521211 (02896)	259.329.727	181821302037554
5	523121 (04277)	9.720.050	181821302049748
	Total	471.222.140	

Belanja Modal
Rp177.368.162.618,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal s.d 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing masing sebesar Rp177.368.162.618,00 dan Rp167.614.128.859,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,82 persen jika dibandingkan TA 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh telah dilaksanakannya berbagai pekerjaan penambahan aset gedung dan bangunan antara lain berbagai pengadaan sarana dan prasarana custom sesuai dengan kebutuhan anggota, pengadaan berbagai barang operasional, termasuk pengadaan True Online UPS DPR RI, Renovasi Lobby Nusantara II, Pengadaan Server, Pengadaan Video Wall, Pengadaan Mesin Foto Copy, Pengadaan PC dan Laptop, pengadaan rambu parkir serta pengadaan berbagai umbul umbul.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal s.d 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.394.497.305	146.544.704.329	0,58
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.160.344.275	12.662.646.000	90,80
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.348.527.945	3.762.517.757	-11,00
Belanja Modal lainnya	2.464.793.093	4.644.260.773	-46,93
Jumlah Belanja	177.368.162.618	167.614.128.859	5,82

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp147.394.497.305,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing masing sebesar Rp147.394.497.305,00 dan Rp146.544.704.329,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,58 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh telah dilaksanakannya berbagai pekerjaan penambahan aset gedung dan bangunan antara lain berbagai pengadaan sarana dan prasarana custom sesuai dengan kebutuhan anggota, pengadaan berbagai barang operasional, pengadaan rambu parkir, pengadaan berbagai umbul umbul, pengadaan True Online UPS, Pengadaan Server, Pengadaan Video Wall, Pengadaan Mesin Fotocopy, Pengadaan PC serta Notebook, serta Pengadaan Switch Access, engadaan Mobil dan Pengadaan CCTV

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.394.497.305	146.544.704.329	0,58
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan mesin	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	147.394.497.305	146.544.704.329	0,58
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	147.394.497.305	146.544.704.329	0,58

Dari belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp147.394.497.305,00 hanya sebesar Rp140.227.982.124,00 yang membentuk peralatan mesin. Sebesar Rp7.166.515.181,00 teridentifikasi sebagai Aktiva Tak Berwujud, belanja barang, gedung dan bangunan, Jalan Irigasi dan jaringan serta peralatan dan mesin ekstrakomptabel, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018
Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.394.497.305
- Teridentifikasi sebagai Belanja Peralatan dan Mesin	140.227.982.124
Teridentifikasi sebagai:	7.166.515.181
- Gedung dan Bangunan	1.053.368.687
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.028.778.522
- Peralatan dan Mesin (Ekstrakomptabel)	558.339.840
- Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel	197.558.917
- Aset Tak Berwujud	3.618.592.202
- Belanja Persediaan	38.248.890
- Belanja pemeliharaan	51.203.263
- Belanja Barang	620.424.860

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp24.160.344.275,00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing masing sebesar Rp24.160.344.275,00 dan Rp12.662.646.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 90,80 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan renovasi lobby nusantara II DPR RI, Pembuatan dan Pemasangan Kanopi Area Samping Nusantara I, Nusantara II, dan Wisma, Pembuatan Air Mancur Plaza Taman Wisata DPR RI, Renovasi Bungalow VIP, Pemasangan Granito Tile Lantai Basement Gedung Nusantara III dan Pembuatan serta Perbaikan Turap

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.132.026.000	1.506.513.000	(24,86)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	23.028.318.275	11.156.133.000	106,42
Jumlah Belanja Kotor	24.160.344.275	12.662.646.000	90,80
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	24.160.344.275	12.662.646.000	90,80

Dari belanja modal sebesar Rp24.160.344.275,00 hanya sebesar Rp21.538.970.401,00 yang membentuk gedung dan bangunan. Sebesar Rp2.621.373.874,00 teridentifikasi sebagai Peralatan dan Mesin dan Jalan Irigasi dan jaringan, aset ekstrakomptabel dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018
Total Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.160.344.275
- Teridentifikasi sebagai Gedung dan Bangunan	21.538.970.401
Teridentifikasi sebagai:	2.621.373.874
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	811.025.608

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018
- Peralatan dan Mesin	1.804.048.266
- Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel	4.200.000
- Belanja Pemeliharaan	2.100.000

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp3.348.527.945,00

B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan s.d 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing masing sebesar Rp3.348.527.945,00 dan Rp3.762.517.757,00 atau mengalami penurunan sebesar -11,00 persen. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada belanja modal jalan dan jembatan serta belanja modal penambahan nilai jaringan masing masing sebesar 14% dan 38%. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2018 digunakan untuk pengembangan fiber optic Gedung Setjen dan Nusantara, perbaikan jalan aspal hotmix sekitar masjid dan wisma, peremajaan sistem PABX, pengembangan jaringan PAM OBVIT serta pemasangan instalasi air bersih di taman depan.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan s.d 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.394.364.000	1.627.417.000	-14,32
Belanja Modal Jaringan	642.425.000	-	0,00
Belanja Penambahan Nilai jaringan	1.311.738.945	2.135.100.757	-38,56
Jumlah Belanja Kotor	3.348.527.945	3.762.517.757	-11,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	3.348.527.945	3.762.517.757	-11,00

Dari belanja modal sebesar Rp3.348.527.945,00 hanya sebesar Rp3.154.345.945,00 teridentifikasi sebagai Jalan, Irigasi dan jaringan. Sebesar Rp194.182.000,00 teridentifikasi sebagai peralatan dan mesin.

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018
Total Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.348.527.945
- teridentifikasi sebagai Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.154.345.945
Teridentifikasi sebagai aset lain:	194.182.000
Peralatan dan Mesin	194.182.000

Belanja Modal Lainnya
Rp2.464.793.093,00

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya s.d 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing masing sebesar Rp2.464.793.093,00 dan Rp4.644.260.773,00 atau mengalami penurunan sebesar 46,93 persen. Penurunan ini disebabkan adanya pengadaan aplikasi tata naskah dinas, pengadaan desain website, serta pengadaan aplikasi tata naskah dinas mobile.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya s.d 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	2.464.793.093	4.604.660.773	-46,47

Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya/Aset lainnya	-	39.600.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	2.464.793.093	4.644.260.773	-46,93
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	2.464.793.093	4.644.260.773	-46,93

Dari belanja modal sebesar Rp2.464.793.093,00 hanya sebesar Rp2.295.428.689,00 teridentifikasi sebagai Jalan, Irigasi dan jaringan. Sebesar Rp169.364.404,00 teridentifikasi sebagai belanja peralatan dan mesin serta peralatan dan mesin ekstrakomptabel.

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018
Total Belanja Modal Lainnya	2.464.793.093
- teridentifikasi sebagai Aset Tak Berwujud dan Aset Tetap Lainnya	2.295.428.689
Teridentifikasi sebagai aset lain:	169.364.404
- Peralatan dan Mesin	142.716.904
- Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	26.647.500

Piutang Bukan Pajak
Rp600.181.033,00

C. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA

C.1 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp600.181.033,00 dan Rp493.439.437,00.

Terdapat penambahan jumlah piutang sebesar Rp90.750.000,00 jika dibandingkan dengan saldo unaudited sebesar Rp509,431,033,00. Penambahan tersebut disebabkan adanya belanja persediaan yang belum dilakukan serah terima barang sampai dengan tanggal pelaporan.

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Piutang PNPB		
Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	2.735.870	208.828.887
Piutang Pemanfaatan BMN (Berupa Sewa)	28.350.000	142.025.000
Piutang Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	75.238.650
Biaya Penggantian Atas Tidak Memenuhi Masa Kerja 5 Tahun	25.000.000	25.000.000
Piutang Lainnya		
Kelebihan Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Uang Makan PNS	374.145.163	11.226.550
Piutang Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	79.200.000	31.120.350
Barang belum diterima (Koreksi Audit)	90.750.000	
Total	600.181.033	493.439.437

Atas piutang sebesar Rp11.226.550,00 yang disebabkan adanya kelebihan belanja pegawai berupa uang makan bulan desember 2017, telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 15 Februari 2018 dengan NTPN No B80D44LGEP8PA93P.

Atas saldo piutang PNPB kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang tercatat pada Neraca Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Per 31 Desember 2017, telah dilakukan penyeteroran ke Kas Negara, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Kelebihan Pembayaran Desember 2018		208.828.887
Pembayaran		
Tanggal 15 Februari 2018 No NTPN B80D44LGEP8PA93P	179.235.558	
Tanggal 21 Maret 2018 No NTPN F5DC875BGF344V8P	1.531.709	
Tanggal 7 September 2018 No NTPN 9F1C67D71DLIM1TP	8.844.000	
Pemotongan Bertahap dengan NTPN 7D5C46F34JC9P0NP, 1046743CRPB2AE7P, 59A0479I6ELA7HPP, 59A0479I6ELA7HPP	2.225.741	
Pemotongan Melalui SKPP	14.256.009	
Total Pembayaran		206.093.017
Sisa Piutang		2.735.870

Atas sisa piutang kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp2.735.870,00 akan diproses untuk dihapuskan. Hal tersebut disebabkan pegawai yang bersangkutan telah pensiun dan SKPP atas pegawai yang bersangkutan telah diterbitkan sebelum melalui proses pemotongan.

Atas kelebihan pembayaran pembelian BBM tahun anggaran 2017 sebesar Rp75.238.650,00 telah disetorkan dengan NTPN 1F10A45BEDKIJMPP. Atas kelebihan pembayaran ini, telah dilakukan penyesuaian pada Laporan Keuangan DPR RI TA 2017.

Atas kelebihan pembayaran tahun anggaran 2017 sebesar Rp31.120.350,00 telah disetorkan dengan NTPN 89D741KFHPOEVDLP. Atas kelebihan pembayaran ini, telah dilakukan penyesuaian pada Laporan Keuangan DPR RI TA 2017.

Rincian Mutasi Tambah dan Kurang atas Piutang PNBP adalah sebagai berikut:

Uraian		Nilai
Saldo Piutang PNBP Per 31 Desember 2017		451.092.537
Mutasi Tambah		2.083.333
a. Piutang (MoU)	2.083.333	
Mutasi Kurang		- 397.090.000
1. Kelebihan Pembayaran Belanja		- 281.331.667
a. Disetorkan melalui SSBP (daftar terlampir)	206.093.017	
b. Kelebihan Pembayaran Belanja barang	75.238.650	
2. Piutang Pemanfaatan BMN		- 115.758.333
a. Pelunasan Piutang Warung	93.375.000	
b. Koreksi nilai Piutang (warung)	20.300.000	
b. Koreksi nilai Piutang (MoU)	2.083.333	
Saldo Piutang PNBP Per 31 Desember 2018		56.085.870
Saldo Piutang Lainnya 31 Desember 2017		42.346.900
Mutasi Tambah		453.345.163
a. Kelebihan Pembayaran uang Makan PNS	47.066.600	
b. Kelebihan Pembayaran tunjangan kinerja	176.314.763	
c. Kelebihan Pembayaran uang lembur	150.763.800	
d. Pengembalian Biaya Pendidikan	79.200.000	
Mutasi Kurang		- 42.346.900
1. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	11.226.550	
2. Piutang Kelebihan Belanja Barang	31.120.350	
Saldo Piutang Lainnya 31 Desember 2018		453.345.163
Saldo Piutang PNBP Per 31 Desember 2018		509.431.033

Atas piutang berupa biaya penggantian atas tidak memenuhi masa kerja 5 (lima) tahun telah dilakukan usaha-usaha untuk melakukan penagihan, namun demikian, setelah dilakukan berbagai upaya penagihan yang dilakukan, piutang tersebut tidak berhasil diterima pembayarannya. Atas hal tersebut, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Surat Nomor: IU/20758/SETJEN DPR RI/11/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Usulan untuk tidak dapat ditindaklanjuti menyimpulkan bahwa piutang kepada pihak tersebut statusnya tidak dapat ditindaklanjuti dan dapat dinyatakan selesai. Penghapusan atas piutang ini akan masih perlu dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Atas piutang penggantian atas tidak memenuhi masa kerja, telah dilakukan perubahan status piutang dari lancar menjadi diragukan. Perubahan status piutang tidak dilakukan menjadi macet karena belum dilimpahkan ke Kementerian Keuangan.

Bagian Lancar TP/TGR
Rp000,00

C.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp000,00 dan Rp250.000.000,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2018

Nama	31 Desember 2018	31 Desember 2017
SS	-	250.000.000
Total	-	250.000.000

Pengurangan saldo tersebut disebabkan adanya penyetoran sebesar Rp40.000.000,00 dengan No NTPN BFAFE84941S60MA9 tertanggal 28 Juni 2018.

Selain itu, berdasarkan keputusan Majelis Kerugian Negara, atas saldo Tagihan TP/TGR sebesar Rp210.000.000,00 diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu, saldo bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi direklasifikasi ke piutang jangka panjang pada akun piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi dengan kategori macet.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jangka
Pendek Rp15.375.905,17

C.3 Penyisihan Piutang Tak tertagih - Piutang Jangka Pendek

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp15.375.905,00 dan Rp26.140.698,00.

Terdapat penambahan jumlah penyisihan piutang sebesar Rp453.750,00 jika dibandingkan dengan saldo unaudited sebesar Rp14.922.155,00. Penambahan tersebut disebabkan adanya penambahan jumlah piutang lainnya akibat adanya belanja persediaan yang belum dilakukan serah terima barang sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan piutang tak tertagih-jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	31.085.870	0,50%	155.429
Diragukan	25.000.000	50%	12.500.000
Jumlah	56.085.870		12.655.429
Piutang Lainnya			
Lancar	544.095.163	0,50%	2.720.476
Jumlah	544.095.163		2.720.476
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	600.181.033		15.375.905

Berdasarkan keputusan Majelis Kerugian Negara, atas saldo Tagihan TP/TGR diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu, saldo bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi direklasifikasi ke piutang jangka panjang pada akun piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi dengan kategori macet.

Berdasarkan perlakuan tersebut, maka penyisihan atas piutang TP TGR juga direklasifikasi ke penyisihan piutang TGR jangka panjang

Persediaan
Rp23.226.536.663,00

C.4 Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp23.226.536.663,00 dan Rp18.560.434.078,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat penambahan sebesar Rp1.188.490.383,00 dan pengurangan sebesar Rp90.750.000,00 yang disebabkan oleh:

- Adanya penambahan saldo persediaan akibat temuan lencana emas sebanyak 100 unit senilai Rp555.500.000,00
- Adanya penambahan saldo persediaan akibat temuan barang persediaan yang tidak habis di gudang senilai Rp632.990.383,00
- Adanya pengurangan persediaan akibat belum diterimanya barang persediaan sampai dengan tanggal pelaporan senilai Rp90.750.000,00. Atas transaksi ini juga sudah dicatat kedalam nilai piutang.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	16.957.357.558	14.390.219.054
Bahan untuk Pemeliharaan	2.726.968.905	1.640.114.887
Suku Cadang	552.108.437	615.440.955
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	280.597.700	470.825.200
Bahan Baku	176.227.761	141.703.807
Persediaan Lainnya	2.533.276.302	1.302.130.175
Total	23.226.536.663	18.560.434.078

Rincian Realisasi Belanja Persediaan dapat disajikan dalam rincian berikut:

Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	37.346.024.440	36.537.455.558
Belanja Barang Persediaan Lainnya	8.640.529.035	8.433.743.328
Belanja Barang Persediaan pemeliharaan Gedung dan	2.241.452.580	1.052.254.482
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135.994.100	165.667.700
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	259.220.500	-
Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	165.000.000
Total	48.623.220.655	46.354.121.068

Rincian pembentukan persediaan baik yang berasal dari belanja persediaan maupun dari belanja modal adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018
Total Belanja Persediaan	48.623.220.655
Mutasi Tambah	314.862.300
Belanja Modal Membentuk Persediaan	314.862.300
Mutasi Kurang	224.160.570
- Belanja Persediaan untuk tagihan TAYL	108.240.000
- Belanja Persediaan membentuk Aset	25.170.570
- Belanja Persediaan belum membentuk	90.750.000
Total Inputan Aplikasi	48.713.922.385

Tanah
Rp188.409.157.000,00

C.5 Tanah

Saldo Tanah Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp188.409.157.000,00 dan Rp188.409.157.000,00.

Rincian mutasi aset tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2017	188.409.157.000
Mutasi Tambah	-
- Revaluasi Aset	-
Mutasi Kurang	-
-	-
Saldo Per 31 Desember 2018	188.409.157.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	188.409.157.000

Lokasi Tanah yang berada di dalam penguasaan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tanah Komplek Rumah Jabatan Anggota Ulujami
2. Tanah Komplek DPR RI Kemanggisan
3. Tanah Komplek DPR RI Kebon Jeruk
4. Tanah Komplek DPR RI Kelapa Dua
5. Tanah Komplek DPR RI Meruya I
6. Tanah Komplek DPR RI Meruya II
7. Tanah Komplek DPR RI Meruya IV
8. Tanah Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI

Pada 6 (enam) komplek pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana disebutkan diatas, luasan total sesuai sertifikat adalah 170.844 M2. Berdasarkan hasil konfirmasi terakhir dengan Badan Pertanahan Nasional, saldo tanah yang telah mengalami alihfungsi menjadi rumah negara golongan III adalah sebesar 80.061, sehingga luas tanah yang menjadi hak DPR adalah 90.783 M2.

Sedangkan berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kementerian PUPERA, diketahui bahwa atas keenam komplek tersebut, sejumlah 109.445 M2 telah dialihfungsi menjadi rumah negara golongan III. sehingga sisa luas tanah keenam komplek tersebut yang dipergunakan untuk fasos dan fasum dan dikuasai DPR RI adalah sebesar 61.399 M2. Sebagai catatan, Luas Tanah keenam komplek tersebut yang tercatat dalam SIMAK BMN adalah sebesar 52.122 M2.

Berdasarkan kedua data tersebut, DPR RI telah melaksanakan rekonsiliasi lebih lanjut, baik dengan BPN dan Kementerian PUPERA untuk mendapatkan luas tanah yang benar benar menjadi hak DPR RI. Telah dibentuk Tim Pengukuran Tanah DPR RI.

Tanah berupa jalan masuk ke Wisma Griya Sabha Kopo seluas 62 m² dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan dari pemerintah setempat sedang dilakukan proses pensertifikatan.

Untuk tanah kompleks DPR/MPR/DPD-RI yang masih dalam proses pelepasan HPL oleh Kementerian Sekretariat Negara dan selama masih belum terbit sertifikat HPL maka pengembangan atas tanah kompleks DPR/MPR/DPD-RI seluas 404.823 m² dengan nilai sebesar Rp14.986.653.857,00 direklas dari akun tanah ke akun aset tetap lainnya atas saran BPK RI yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Tripartit No.023/PB.6.4/2009 Tanggal 15 April 2010.

Peralatan dan Mesin
Rp1.320.157.553.414,00

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp1.320.157.553.414,00 dan Rp1.188.424.521.149,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp182.688.800,00 dari saldo unaudited. Pengurangan tersebut disebabkan adanya reklas dari peralatan dan mesin kelompok alat kantor dan rumah tangga ke lisensi sebagai akibat koreksi atas temuan BPK.

Rincian mutasi peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2017	182.021	1.188.424.521.149
Mutasi Tambah	7.744	145.279.908.334
Pembelian	4.753	112.346.438.749
Pengembangan Nilai Aset	-	1.347.256.410
Pembatalan Penghapusan	433	2.704.740.890
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.558	27.074.462.885
Pengembangan Melalui KDP	-	1.807.009.400
Mutasi Kurang	(1.794)	(13.546.876.069)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1.857)	(13.092.628.801)
Penghapusan	(1)	(268.417.500)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	64	(185.829.768)
Saldo Per 31 Desember 2018	187.971	1.320.157.553.414
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-	929.544.472.379
Nilai Buku Per 31 Desember 2018		390.613.081.035

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pembelian sebesar Rp112.346.438.749,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	ALAT BESAR	78	809.488.518
2	ALAT ANGKUTAN	41	1.059.654.500
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	12	57.920.650
4	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	2.524	26.695.990.500
5	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	603	44.917.255.183
6	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	9	964.389.710
7	ALAT LABORATORIUM	141	8.933.837.264
No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan

8	ALAT PERSENJATAAN	100	235.092.000
9	KOMPUTER	1.244	28.628.810.424
10	ALAT KESELAMATAN KERJA	1	44.000.000
	Total	78	112.346.438.749

2. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp1.347.256.410,00 yang terdiri atas:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	ALAT BESAR	-	571.386.410
2	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	-	486.870.000
3	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	-	43.610.000
4	ALAT LABORATORIUM	-	11.620.000
5	ALAT PERSENJATAAN	-	2.100.000
6	KOMPUTER	-	213.160.000
7	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	8.010.000
8	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	2.100.000
9	RAMBU - RAMBU	-	8.400.000
	Total	-	1.347.256.410

3. Pembatalan penghapusan sebesar Rp2.704.740.890,00 dengan kuantitas 433, buah yang terdiri atas:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	ALAT BESAR	1,00	2.613.978
2	ALAT ANGKUTAN	12,00	457.147.800
3	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	240,00	1.737.169.273
4	KOMPUTER	180,00	507.809.839
	Total	433,00	2.704.740.890

4. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp27.074.462.885,00 dengan kuantitas 2558, buah yang terdiri atas:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	ALAT BESAR	98,00	2.673.590.999
2	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	2.225,00	22.421.867.640
3	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	28,00	850.170.606
4	ALAT LABORATORIUM	2,00	162.214.200
5	KOMPUTER	5,00	71.765.167
6	ALAT KESELAMATAN KERJA	8,00	165.689.928
7	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2,00	142.121.000
8	RAMBU - RAMBU	190,00	587.043.345
	Total	2.558,00	27.074.462.885

5. Pengembangan Melalui KDP adalah sebesar Rp1.807.009.400,00 dengan kuantitas nihil yang terdiri atas:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	ALAT BESAR	-	623.812.000
2	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	-	636.844.000
3	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	-	388.172.000
4	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	158.181.400
	Total	-	1.807.009.400

6. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar -Rp13.092.628.801,00 dengan kuantitas

-1857, buah yang terdiri atas:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	PERALATAN OLAH RAGA	2,00	(338.305.000)
2	ALAT BESAR	2,00	(44.644.978)
3	ALAT ANGKUTAN	24,00	(1.332.497.784)
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	5,00	(8.966.150)
5	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	1.553,00	(8.746.169.649)
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	149,00	(1.128.885.562)
7	ALAT LABORATORIUM	2,00	(977.020.000)
8	ALAT PERSENJATAAN	2,00	(195.250.000)
9	KOMPUTER	96,00	(299.203.178)
10	RAMBU - RAMBU	22,00	(21.686.500)
	Total	1.857,00	(13.092.628.801)

Selain itu terdapat penghapusan BMN senilai Rp268.417.500,00 yang merupakan penghapusan atas mini bus sesuai SK Sekjen No.741/SEKJEN/2018 tertanggal 11 April 2018. Mutasi kurang lainnya berasal dari koreksi minus pencatatan aset alat keselamatan kerja sebesar Rp3.140.968,00 dan koreksi minus alat kantor dan rumah tangga hasil koreksi audit LK TA 2018 sebesar Rp182.688.800,00

Gedung dan Bangunan
Rp907.534.052.443,00

C.7 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp907.534.052.443,00 dan Rp885.368.481.115,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat perubahan nilai gedung dan bangunan yang disebabkan adanya penghapusan gedung nusantara V sebagai tindak lanjut koreksi Audit BPK. Koreksi tersebut disebabkan adanya pencatatan ganda atas gedung nusantara V oleh DPR dan MPR. Berdasarkan pertemuan antara DPR dan MPR, disepakati bahwa gedung nusantara V akan dicatat oleh MPR, sehingga dikoreksi dari SIMAK DPR.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2017	296	885.368.481.115
Mutasi Tambah	22	47.427.911.388
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	602.991.431
Pengembangan Nilai Aset	-	1.580.794.679
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	21	3.451.316.090
Pengembangan Melalui KDP	-	16.959.336.888
Jurnal Penyesuaian pada Satkon (Gedung Nus V)	1	24.833.472.300
Mutasi Kurang	(1)	(25.262.340.060)
Koreksi Pencatatan	(1)	(25.222.324.250)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-	(40.015.810)
Saldo Per 31 Desember 2018	317	907.534.052.443
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-	188.580.554.347
Nilai Buku Per 31 Desember 2018		718.953.498.096

Adanya jurnal penyesuaian yang dilakukan pada Satker Konsolidasi, bertujuan untuk

mengembalikan nilai gedung Nusantara V yang dikoreksi catat pada saat pelaksanaan takeout Reval. Rincian Perubahan Nilai Gedung dan Bangunan Nusantara V dijelaskan sebagai berikut:

1. Gedung Nusantara V dikoreksi nilainya akibat revaluasi sebesar Rp24.833.472.300,00.
2. Pada akhir tahun 2018, nilai Gedung Nusantara V dikoreksi nilainya akibat kebijakan takeout revaluasi sebesar Rp24.833.472.300,00.
3. Berdasarkan hasil audit BPK atas LK DPR RI TA 2018, Gedung Nusantara V perlu dihapus dari SIMAK DPR karena sudah dicatat di MPR. Atas koreksi ini, dilakukan koreksi pencatatan pada SIMAK sebesar Rp25.222.324.250,00. Nilai tersebut merupakan seluruh nilai Nusantara V dari sejak saldo awal, pengembangan, sampai dengan revaluasi.
4. Atas koreksi tersebut, nilai Gedung Nusantara V di SIMAK menjadi Minus, sehingga dilakukan jurnal penyesuaian di Satker Konsolidasi untuk mengembalikan nilai revaluasi aset sebesar Rp24.833.472.300,00.

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) sebesar Rp602.991.431,00 yang dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	BANGUNAN GEDUNG	-	602.991.431
	Total	-	602.991.431

2. Pengembangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.580.794.679,00 yang dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	BANGUNAN GEDUNG	-	1.580.794.679
	Total	-	1.580.794.679

3. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp3.451.316.090,00 yang dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	BANGUNAN GEDUNG	19	3.073.491.090
2	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2	377.825.000
	Total	21	3.451.316.090

4. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp16.959.336.888,00 yang dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	BANGUNAN GEDUNG	-	16.959.336.888
	Total	-	16.959.336.888

5. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) sebesar -Rp40.015.810,00 yang dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
----	----------	-----------	-----------------

1	BANGUNAN GEDUNG	-	-	30.444.011
2	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-	9.571.799
	Total	-	-	40.015.810

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp90.637.956.944,00

C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp90.637.956.944,00 dan Rp85.649.875.877,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2017	5.035	85.649.875.877
Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan	1	1.199.184.000
Pengembangan Nilai Aset	-	6.300.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	114.320.000
Pengembangan Melalui KDP	-	1.078.564.000
Mutasi Tambah Irigasi	11	1.127.024.522
Pembelian	4	121.965.000
Pengembangan Nilai Aset	-	4.200.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	7	807.779.522
Pengembangan Melalui KDP	-	193.080.000
Mutasi Tambah Jaringan	10	2.667.941.553
Pembelian	2	306.318.210
Pengembangan Nilai Aset	-	710.610.525
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	8	1.192.315.608
Pengembangan Melalui KDP	-	458.697.210
Mutasi Kurang Pada Jalan dan Jembatan	2	(6.069.008)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	2	(6.069.008)
Saldo Per 31 Desember 2018	5.055	90.637.956.944
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-	40.142.772.764
Nilai Buku Per		50.495.184.180

Untuk mutasi tambah pada jalan dan jembatan diantaranya adalah perbaikan jalan aspal hotmix di basement Nusantara I, sekitar area lapangan bola basement, jalur protokol dan poskopam, jalur motor DPR RI, jalan di sekitar masjid dan gedung mekanik, serta pemasangan paving block sekitar kandang rusa.

Untuk mutasi tambah jaringan antara lain adalah pengembangan Fiber Optic Gedung Setjen, pengembangan jaringan Pam Obvit, pengembangan jaringan media sosial Sekjen dan BK, penarikan kabel power TV Wall Gedung Nusantara serta pengembangan jaringan di wisma griya sabha.

Aset Tetap Lainnya
Rp19.832.817.868,00

C.9 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp19.832.817.868,00 dan Rp19.238.192.079,00.

Saldo tersebut terdiri atas Aset Tetap Renovasi dan Aset Tetap Lainnya. Saldo Aset Tetap Renovasi selama TA 2017 tidak mengalami mutasi bertambah maupun mutasi berkurang. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2017	100.029	19.238.192.079
---	----------------	-----------------------

Mutasi Tambah	320	594.625.789
Pembelian	320	594.194.189
Pengembangan Nilai Aset	-	431.600
Mutasi Kurang	-	-
Saldo Per 31 Desember 2018	100.349	19.832.817.868
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2018		19.832.817.868

Mutasi tambah aset tetap lainnya keseluruhannya berasal dari pembelian buku buku perpustakaan (Bahan Perpustakaan Tercetak).

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp1.158.267.799.490,00

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp1.158.267.799.490,00 dan Rp1.002.107.920.260,00.

Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, terdapat perubahan atas saldo akumulasi penyusutan aset tetap yang disebabkan oleh:

1. Pengurangan Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp18.268.906,00 akibat koreksi audit berupa reklasifikasi dari peralatan dan mesin kepada lisensi.
2. Pengurangan Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.230.357.280,00 akibat koreksi audit berupa koreksi pencatatan gedung nusantara V yang semula dicatat DPR, dialihkan untuk dicatat MPR.
3. Pengurangan Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp615,178,640,00 akibat koreksi audit berupa koreksi pencatatan gedung nusantara V yang semula dicatat DPR, dialihkan untuk dicatat MPR. Pengurangan akumulasi pencatatan ini dilakukan untuk menghilangkan transaksi penyusutan reguler semester II atas koreksi pencatatan tersebut.
4. Penambahan Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp636.755.700,00 akibat koreksi audit berupa pencatatan kembali gedung nusantara V yang semula dihapuskan pada transaksi takeout reval. (Lihat penjelasan pada bagian gedung dan bangunan).
5. Selain itu, terdapat pengurangan Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.867.648,00 akibat koreksi atas transaksi takeout revaluasi sesuai dengan S-182/PB/2019. Atas transaksi ini, telah dilakukan koreksi pada satker konsolidasi.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	1.320.157.553.414	929.544.472.379	390.613.081.035
Gedung dan Bangunan	907.534.052.443	188.580.554.347	718.953.498.096

Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan	90.637.956.944	40.142.772.764	50.495.184.180
Total	2.318.329.562.801	1.158.267.799.490	1.160.061.763.311

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
Rp216.000.000,00

C.11 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp216.000.000,00 dan Rp000,00.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi ini merupakan hak pemerintah atas kerugian negara yang dibebankan kepada pegawai atau pejabat negara. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR ini terdiri atas dua transaksi, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Reklas dari Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (an SS)	210.000.000	-
Tagihan TP / TGR Penyelesaian Aset	6.000.000	-
Total	216.000.000	-

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp63.000.000,00

C.12 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp63.000.000,00 dan Rp000,00.

Piutang Jangka Panjang Lainnya ini melaporkan kewajiban pengembalian biaya pendidikan S2 dan S3 yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan atas Pegawai yang tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan. Pengembalian biaya pendidikan dilakukan secara angsuran, sehingga atas angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, direklasifikasi kedalam piutang jangka panjang lainnya. Rincian piutang jangka panjang dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah	Keterangan
Piutang Pengembalian Biaya Pendidikan (Rp100.000.000 diangsur 20 kali)	100.000.000	-
Piutang Pengembalian Biaya Pendidikan (Rp47.000.000,00 diangsur 27 kali)	47.000.000	-
Piutang Jangka Panjang	147.000.000	
Sudah Dibayarkan Pada TA 2018	4.800.000	
Saldo Piutang Jangka Panjang	142.200.000	
Direklas Ke Piutang Lainnya Jangka Pendek		
a. Piutang Pengembalian Biaya Pendidikan (Rp100.000.000 diangsur 20 kali)	60.000.000	
b. Piutang Pengembalian Biaya Pendidikan (Rp47.000.000,00 diangsur 27 kali)	19.200.000	
Total Reklas Ke Jangka Pendek 31 Desember 2018	79.200.000	
Saldo Piutang Jangka Panjang	63.000.000	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek Rp210.345.000,00

C.13 Penyisihan Piutang Tak tertagih - Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar -Rp210.345.000,00 dan Rp000,00.

Penyisihan piutang tak tertagih - Jangka Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang pada

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Jangka Panjang Lainnya	63.000.000		315.000
a. Piutang Pengembalian Biaya Pendidikan (Rp100.000.000 diangsur 20 kali)	40.000.000	0,50%	200.000
b. Piutang Pengembalian Biaya Pendidikan (Rp47.000.000,00 diangsur 27 kali)	23.000.000	0,50%	115.000
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	216.000.000		210.030.000
a. Reklas Dari Bagian Lancar Tagihan TP/TGR an SS	210.000.000	100,00%	210.000.000
b. Piutang Tagihan TP/TGR an TH	6.000.000	0,50%	30.000
Jumlah	279.000.000		210.345.000

Berdasarkan keputusan Majelis Kerugian Negara, atas saldo Tagihan TP/TGR diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu, saldo bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi direklasifikasi ke piutang jangka panjang pada akun piutang tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi dengan kategori macet dan penyisihan 100%

Aset Tak Berwujud
Rp47.375.876.247,00

C.14 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp47.375.876.247,00 dan Rp41.851.828.145,00.

Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, terdapat perubahan atas saldo aset tak berwujud yang disebabkan oleh:

1. Penambahan nilai software Sistem Pengolahan Dokumen Digital (koreksi audit BPK) yang dibeli dengan menggunakan akun 521119 sebesar Rp107.800.000,00
2. Penambahan nilai software Sistem Inventaris Ruang Ruang Wisma DPR RI Kopo (koreksi audit BPK) yang dibeli dengan menggunakan akun 522131 sebesar Rp48.310.000,00 dan Rp48.543.000,00
3. Penambahan nilai lisensi berupa 28 Lisensi Microsoft Office Gov (koreksi audit BPK) yang dibeli dengan menggunakan akun 532 sebesar Rp182.688.800,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Software	26.151.026.082
2	Lisensi	6.591.314.000
3	Hasil Kajian/Penelitian	9.499.779.000
4	Aset Tak Berwujud Lainnya	5.133.757.165

	Jumlah Nilai perolehan per 31 Desember 2018	47.375.876.247
	Amortisasi ATB s.d 31 Desember 2018	22.343.908.839
	Total	25.031.967.408

Rincian Mutasi Bertambah Aset Tak Berwujud dijabarkan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2017	546	41.851.828.145
Mutasi Tambah dan Kurang Software	34	1.161.827.500
Pembelian	34	1.161.827.500
Mutasi Tambah dan Kurang Lisensi	415	1.699.375.200
Pembelian	415	1.699.375.200
Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tak Berwujud Lainnya	93	2.275.503.602
Pembelian	93	2.275.503.602
Saldo Per 31 Desember 2018	1.088	46.988.534.447
Amortisasi ATB s.d 31 Desember 2018	-	22.343.908.839
Nilai Buku Per 31 Desember 2018		24.644.625.608

Pembelian pada Software merupakan pengadaan aplikasi tata naskah dinas Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI, pembuatan aplikasi e surat menggunakan codeigniter, pengadaan aplikasi tata naskah dinas mobile, pembuatan aplikasi e-surat untuk android dan ios serta pengadaan desain website Setjen dan BK DPR RI.

Pembelian pada lisensi diantaranya pembelian support dan lisensi access point, pengadaan microsoft office home dan business, pembelian office for mac. Pembelian pada ATB lainnya antara lain Aimetis All Analytics, Enterprise, Face Recognition, dan Pembuatan Aplikasi DPR e-Library serta Pengadaan Aplikasi Perpajakan

Aset Lain lain
Rp18.627.927.252,00

C.15 Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp18.627.927.252,00 dan Rp16.513.703.434,00.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN. Sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas saldo aset lain-lain di DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2017	417	16.513.703.434
Mutasi Tambah	1.857	13.092.628.801
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain	1.857	13.092.628.801
Mutasi Kurang	(1.879)	(10.978.404.983)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(1.878)	(10.961.109.299)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Ya	(1)	(17.295.684)
Saldo Per 31 Desember 2018	395	18.627.927.252
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-	8.284.185.458
Nilai Buku Per 31 Desember 2018		10.343.741.794

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transaksi penambahan berupa Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain dengan kuantitas 1.857 buah senilai Rp13.092.628.801,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	PERALATAN OLAH RAGA	2	338.305.000
2	ALAT BESAR	2	44.644.978

3	ALAT ANGKUTAN	24	1.332.497.784
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	5	8.966.150
5	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	1.553	8.746.169.649
No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	149	1.128.885.562
7	ALAT LABORATORIUM	2	977.020.000
8	ALAT PERSENJATAAN	2	195.250.000
9	KOMPUTER	96	299.203.178
10	RAMBU - RAMBU	22	21.686.500
	Total	1.857	13.092.628.801

2. Transaksi pengurangan berupa Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola dengan kuantitas -1.878 buah senilai -Rp10.961.109.299,00 dengan rincian dibawah ini. Seluruh informasi terkait BA Usulan Penghapusan tersedia dalam lampiran LK ini.

No	Kelompok	Kuantitas	Harga Perolehan
1	ALAT BESAR	(2)	(44.644.978)
2	ALAT ANGKUTAN	(12)	(457.147.800)
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	(5)	(8.966.150)
4	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	(1.559)	(8.928.869.292)
5	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	(24)	(714.468.062)
6	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-
7	ALAT LABORATORIUM	-	-
8	KOMPUTER	(276)	(807.013.017)
	Total	(1.602)	(10.961.109.299)

Dalam saldo aset lain-lain tersebut, terdapat saldo Aset lain-lain yang diinput melalui SAIBA dan tidak diinput melalui SIMAK-BMN senilai Rp1.887.966.208,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok	Harga Perolehan
1	Belanja Modal yang terdefinisi sebagai aset lain-lain pada tahun 2007-2010, yang setelah dilakukan penelusuran dokumen dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan negara masih harus ditindaklanjuti senilai Rp869.187.588,00	869.187.588
	Teridentifikasi sebagai belanja pemeliharaan	337.353.662
	Teridentifikasi sebagai belanja barang	1.448.370
	Teridentifikasi sebagai barang pakai habis	205.700.000
	Belum teridentifikasi	324.685.556
2	Pembayaran Listrik dan Telepon anggota di tahun anggaran 2004 yang tak tertagih, dimana sesuai audit BPK tahun 2006 harus dikategorikan sebagai aset lain-lain senilai Rp1.018.778.620,00	1.018.778.620
	Tunggakan Listrik dan Telepon Anggota Periode 1999 - 2004	610.957.505
	Hasil lelang barang inventaris/kekayaan Negara yang belum dibayar oleh anggota	407.821.115
	Total	1.887.966.208

Selain mutasi tambah dan mutasi kurang yang sudah disebutkan, terdapat mutasi kurang yang disebabkan adanya usulan barang hilang ke pengelola berupa 1 buah alat angkutan senilai Rp17.295.684,00

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp30.628.094.297,00

C.16 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp30.628.094.297,00 dan Rp5.846.076.518,00.

Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, terdapat perubahan atas saldo akumulasi penyusutan aset tetap yang disebabkan oleh:

1. Penambahan Akumulasi Amortisasi Software sebesar Rp13.475.000,00. Penambahan tersebut akibat koreksi audit BPK berupa belanja barang yang teridentifikasi membentuk software.
2. Penambahan Akumulasi Amortisasi Software sebesar Rp6.067.875,00. Penambahan tersebut akibat koreksi audit BPK berupa belanja barang yang teridentifikasi membentuk software.
3. Penambahan Akumulasi Amortisasi Software sebesar Rp6.038,750,00. Penambahan tersebut akibat koreksi audit BPK berupa belanja barang yang teridentifikasi membentuk software.
4. Penambahan Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp9.134.440,00. Penambahan tersebut akibat koreksi audit BPK berupa belanja modal peralatan dan mesin yang teridentifikasi membentuk lisensi.

Rincian Akumulasi Amortiasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Software	26.151.026.082	21.066.706.780	5.084.319.302
Lisensi	6.591.314.000	1.277.202.059	5.314.111.941
Aset Lain-lain	16.739.961.044	8.284.185.458	8.455.775.586
Total	49.482.301.126	30.628.094.297	18.854.206.829

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp99.388.158,00

C.17 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo utang kepada pihak ketiga Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp99.388.158,00 dan Rp2.359.840.672,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Belanja Pegawai YMH Dibayar	92.272.158	8.806.145
Belanja Barang YMH Dibayar	7.116.000	2.351.034.527
Belanja Modal YMH Dibayar	-	-
Total	99.388.158	2.359.840.672

Nilai Hutang Kepada Pihak Ketiga pada TA 2017 disebabkan adanya keterlambatan pemrosesan penagihan belanja di Kementerian Keuangan yang menyebabkan 5 (lima) Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp471,222,140,00 gagal terbayar. Kelima tagihan tersebut telah diakui dalam kewajiban lancar tahun 2017 dan telah dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2018.

Rincian utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2017 disajikan sebagai berikut:

No	Akun (No SPM)	Jumlah	Keterangan
1	522111 (02250)	84.240.000	PT Mora Telematika Indonesia (Termin IV Pembayaran Internet Colocation)
2	521811 (02393)	54.120.000	CV Karunia Alam Hijau (Pencetakan BK ASP Vol 8 No 2 Tahun 2017)
3	522111 (02394)	54.120.000	CV Karunia Alam Hijau (Pencetakan BK JNH Vol 8 No 2)
4	523129 (02896)	9.692.363	PT Malibu Lancar Abadi (Termin XVI Fixed Price Pemeliharaan Wisma Kopo)
5	521211 (02896)	259.329.727	PT Malibu Lancar Abadi (Termin XVI Fixed Price Pemeliharaan Wisma Kopo)
6	523121 (04277)	9.720.050	CV Diyan Tirtayasa (5%) Belanja Pemeliharaan Gedung
	Total	471.222.140	

Selain hutang tersebut, terdapat penambahan belanja barang yang masih harus dibayar pada laporan keuangan DPR RI per 31 Desember 2017 akibat temuan audit. Rincian Penambahan belanja barang yang masih harus dibayar antara lain:

No	Akun	Jumlah	Keterangan
1	522111	1.726.173.172	Langganan Listrik
2	522112	153.639.215	Langganan Telepon
	Total	1.879.812.387	

Berdasarkan informasi serta dokumen sumber yang diperoleh, atas kedua belanja barang tersebut telah dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban langganan listrik dibayarkan dengan SP2D No 181821302000999 tanggal 26 Januari 2018
2. Beban langganan telepon dibayarkan dengan SP2D No 181821301000278 tanggal 25 Januari 2018

Selain hutang tersebut, terdapat penambahan belanja barang yang masih harus dibayar pada laporan keuangan DPR RI per 31 Desember 2018 dengan berbagai sebab, antara lain:

No	Akun	Jumlah	Keterangan
1	51	92.272.158	Beban uang Kehormatan, bantuan penunjang kegiatan dewan, tunjangan komunikasi intensif, barang operasional lainnya, honor output kegiatan, honor tetap, dan beban uang makan PNS

2	52	7.116.000	Beban Perjalanan Biasa
	Total	99.388.158	

Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp5.361.621.728,33

C.18 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp5.361.621.728,00 dan Rp4.439.877.981,00.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2018
1	ATM BCA	46.312.500
2	Bina Serbaguna	60.399.625
3	BNI ATM	74.147.500
4	BNI ATM Center	49.530.528
5	BNI ATM Kalibata	25.132.100
6	BNI Kantor	242.042.583
7	BRI ATM Center	8.255.667
8	BRI ATM Kalibata	25.132.100
9	Indosat	246.052.000
10	Indosat BTS	67.500.000
11	Jateng Citra Boga	246.527.213
12	Koperasi	124.221.020
13	Mac Sarana Jaya	-
14	Mandiri ATM	190.377.000
15	Mandiri ATM Center	12.384.000
16	Mandiri ATM Kalibata	-
17	Mandiri ATM Ulujami	2.365.530
18	Mandiri Kantor	2.629.219.450
19	Masa Depan Bersama	26.383.862
20	Prima Media Selaras	-
21	PT POS	8.679.000
22	Risanti	19.823.791
23	Telkomsel	688.560.000
24	XL Antena GSM	417.171.716
25	Mandiri ATM Kopo	10.151.685
26	Mandiri ATM Café	63.459.000
27	Koperasi MPR	11.631.360
28	ATM BCA 2	46.312.500
29	Warung Warung di DPR RI	19.850.000
	Total	5.361.621.728

Ekuitas
Rp1.422.098.434.286,00

C.19 Ekuitas

Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp1.422.098.434.286,00 dan Rp1.409.731.081.066,00

Terdapat penambahan atas ekuitas setelah periode audit yang disebabkan oleh:

1. Pengurangan atas jumlah defisit sebesar Rp1.354.656.414,00 yang disebabkan oleh:
 - a. Pengurangan beban persediaan akibat ditemukannya barang persediaan dalam gudang senilai Rp632,990,383,00
 - b. Pengurangan beban barang dan jasa akibat ditemukannya belanja barang teridentifikasi sebagai persediaan senilai Rp555.500.000,00
 - c. Pengurangan beban barang dan jasa akibat ditemukannya belanja barang teridentifikasi sebagai aset senilai Rp204.653.000,00
 - d. Pengurangan beban penyusutan akibat koreksi pencatatan ganda gedung nusantara V sebesar Rp615,178,640,00
 - e. Pengurangan beban penyusutan akibat reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke lisensi sebesar Rp18.268.906,00
 - f. Penambahan beban penyusutan akibat koreksi kembali hasil revaluasi aset sebesar Rp636.755.700,00
 - g. Penambahan beban penyusutan akibat reklasifikasi belanja barang yang teridentifikasi membentuk aset senilai Rp34.716.065,00

2. Penambahan nilai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang disebabkan:
 - a. Pengurangan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi akibat koreksi pencatatan ganda pada gedung nusantara V sebesar Rp25.223.080.849,00
 - b. Penambahan nilai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi akibat pencatatan nilai kembali angka revaluasi sebesar Rp24.833.472.300,00. Pencatatan kembali diperlukan agar nilai gedung tidak minus setelah dilakukan koreksi pencatatan ganda.
 - c. Penambahan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi akibat koreksi pencatatan ganda pada gedung nusantara V sebesar Rp1.230.357.280,00. Nilai ini digunakan untuk mengembalikan angka akumulasi penyusutan yang sebelumnya sudah dikurangkan

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan

Pendapatan Penerimaan
Bukan Pajak
Rp4.517.213.110,00

D. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak

Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp4.517.213.110,00 dan Rp3.265.308.372,00.

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.347.144.748	3.244.777.072	33,97%
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	27.868.362	11.531.300	141,68%
Pendapatan Denda Lainnya	-	9.000.000	100,00%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	142.200.000	-	0,00%
Jumlah	4.517.213.110	3.265.308.372	0,00

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan merupakan pendapatan bersifat umum yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka memanfaatkan BMN yang belum digunakan untuk operasional lembaga. Sedangkan pendapatan anggaran lain-lain terdiri atas pendapatan yang diakui atas kewajiban pengembalian biaya pendidikan bagi pegawai yang tidak menyelesaikan tugas belajar.

Selain adanya penambahan kas di bendahara penerimaan yang belum disetor, nilai Pendapatan Operasional juga sudah melalui penyesuaian yang disebabkan adanya pelunasan dan penambahan piutang serta penambahan dan pengurangan pendapatan diterima dimuka. Rincian mutasi pendapatan operasional disajikan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2018		5.855.282.571
Penyesuaian Tambah (Kredit)		2.218.413.262
a. Mutasi Kurang PDDM	2.216.329.929	
b. Penambahan Piutang Warung	2.083.333	
Penyesuaian Kurang (Debet)		3.556.482.723
a. Pelunasan Piutang TA 2017	94.325.000	
b. Mutasi Tambah PDDM	3.434.983.615	
c. Koreksi atas Pendapatan TA 2015 dan 2016	25.090.775	
d. Koreksi Piutang MoU	2.083.333	
Saldo Pendapatan Operasional TA 2018		4.517.213.110

Beban Pegawai
Rp1.016.046.667.347,00

D.2 Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp1.016.046.667.347,00 dan Rp990.754.506.900,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	87.590.498.002	86.013.601.544	1,83%
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	306.670.887.767	300.924.180.541	1,91%
Beban Honorarium	486.654.965.850	472.306.771.579	3,04%
Beban Lembur	7.390.644.833	7.228.567.350	2,24%
Beban Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito	127.739.670.895	124.281.385.886	2,78%
Jumlah	1.016.046.667.347	990.754.506.900	2,55%

Beban Pegawai telah dikurangi dengan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp8.806.145,00 yang merupakan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja Periode Agustus sd Desember tahun anggaran 2017 sebagai akibat perubahan grading pegawai.

Penambahan beban pegawai berasal dari kekurangan pembayaran pada Beban Uang Kehormatan Pejabat negara, Beban bantuan Penunjang Kegiatan Dewan, Beban Tunjangan Komunikasi Intensif, Beban uang Honor Tetap dan Beban Uang Makan PNS.

Realisasi Belanja Pegawai (Netto) Tahun Anggaran 2017		1.016.368.546.497
Penyesuaian Debet		61.072.158
- Penambahan Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	61.072.158	
Penyesuaian Kredit		382.951.308
- Penyelesaian Utang Belanja Pegawai	8.806.145	
- Kelebihan Pembayaran belanja Pegawai (kelebihan tunkin, dan uang makan diketahui setelah tanggal pelaporan)	374.145.163	
Saldo Beban Pegawai TA 2017		1.016.046.667.347

Beban Persediaan
Rp38.333.105.454,00

D.3 Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Aseri Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp38.333.105.454,00 dan Rp37.203.329.756,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat pengurangan atas beban persediaan yang disebabkan adanya koreksi audit berupa penambahan saldo persediaan hasil opname fisik pada unit kerja sebesar Rp632.990.383,00. Barang persediaan tersebut, sebelumnya sudah dicatat sebagai pengeluaran karena sudah dikeluarkan dari gudang. Namun demikian, sampai dengan tanggal pelaporan, barang persediaan tersebut belum habis diserahkan kepada pemakai

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	30.576.629.176	29.519.729.574	3,58%
Beban Persediaan bahan baku	107.494.210	122.428.890	-12,20%
Beban Persediaan Lainnya	7.648.982.068	7.561.171.292	1,16%
Jumlah	38.333.105.454	37.203.329.756	3,04%

Seluruh beban persediaan yang tercatat pada Laporan Keuangan ini, merupakan hasil kiriman aplikasi SIMAK-BMN, sesuai dengan laporan pemakaian persediaan yang dilaporkan oleh unit kerja pengelola persediaan.

Beban Barang dan Jasa
Rp2.260.367.360.266,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp2.260.367.360.266,00 dan Rp2.017.557.942.144,00.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, terdapat pengurangan atas beban barang jasa sebesar Rp760.153.000,00 akibat koreksi audit BPK dengan rincian sebagai berikut:

1. adanya belanja barang operasional lainnya yang teridentifikasi sebagai software sebesar Rp107.800.000,00
2. adanya belanja jasa konsultan yang teridentifikasi sebagai software sebesar Rp48.543.000,00
3. adanya belanja jasa konsultan yang teridentifikasi sebagai software sebesar Rp48.310.000,00
4. adanya belanja barang operasional lainnya yang teridentifikasi sebagai barang persediaan sebesar Rp555.500.000,00

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Munculnya beban aset ekstrakomptabel disebabkan adanya penggunaan akun belanja modal yang membentuk aset ekstrakomptabel (dibawah nilai kapitalisasi).

Pada tahun 2018, terdapat pembayaran atas belanja barang yang masih harus dibayar pada laporan keuangan DPR RI per 31 Desember 2017. Rincian Penambahan belanja barang yang masih harus dibayar antara lain:

No	Akun	Jumlah	Keterangan
1	522111	1.726.173.172	Langganan Listrik
2	522112	153.639.215	Langganan Telepon
	Total	1.879.812.387	

Berdasarkan dokumen sumber yang diperoleh, atas kedua belanja barang tersebut telah dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban langganan listrik dibayarkan dengan SP2D No 181821302000999 tanggal 26 Januari 2018
2. Beban langganan telepon dibayarkan dengan SP2D No 181821301000278 tanggal 25 Januari 2018

Rincian Beban Barang dan Jasa setelah koreksi disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	1.957.019.069.417	1.760.764.733.812	11,15%
Beban barang Non Operasional	216.261.875.934	172.094.714.737	25,66%
Beban Jasa	86.499.806.355	84.648.570.195	2,19%
Beban Aset Ekstrakomptabel	586.608.560	49.923.400	100,00%
Jumlah	2.260.367.360.266	2.017.557.942.144	12,03%

Saldo beban barang dan jasa untuk tahun anggaran 2018, berasal dari realisasi Belanja Barang dan Jasa setelah melalui penyesuaian penyesuaian yang diperlukan, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang/Jasa (Netto) Tahun Anggaran 2018		2.262.703.576.470
Penyesuaian Debet		699.528.910
a. Belanja Modal PM teridentifikasi Ekstrakomptabel	586.608.560	
b. Belanja Modal PM teridentifikasi Honor dan Belanja Barang	81.720.350	
c. Belanja Barang yang masih harus dibayar	31.200.000	
Penyesuaian Kredit		2.275.592.114
a. Pembayaran Tunggakan Belanja 2017	1.879.812.387	
b. Belanja Modal Sebelumnya teridentifikasi honor, dicatat aset	52.210.000	
c. Pembayaran Belanja Barang TAYL	343.569.727	
Saldo Beban Barang/Jasa TA 2017		2.261.127.513.266

Beban Pemeliharaan
Rp146.932.372.972,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp146.932.372.972,00 dan Rp125.524.169.071,00.

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan setelah koreksi disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.550.020.473	39.317.192.000	43,83%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	19.054.511.450	21.123.638.800	-9,80%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.577.011.635	32.650.048.040	21,22%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.004.330.850	27.697.812.153	-2,50%
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	498.434.000	-100,00%
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	0,00%
Beban Pemeliharaan Lainnya	517.945.115	420.862.200	23,07%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.221.075.849	3.114.789.546	3,41%
Beban Persediaan suku cadang	805.718.683	701.392.332	14,87%
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	201.758.917	-	#DIV/0!
Jumlah	146.932.372.972	125.524.169.071	17,06%

Saldo Beban Pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2018, berasal dari realisasi belanja pemeliharaan setelah melalui penyesuaian penyesuaian yang diperlukan. Selain itu Beban Pemeliharaan juga meliputi pemakaian persediaan yang dimaksudkan untuk pemeliharaan, yaitu pemakaian atas suku cadang serta bahan untuk pemeliharaan. Rincian mutasi beban pemeliharaan disajikan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pemeliharaan (Netto) Tahun Anggaran 2018		144.992.294.753
Penyesuaian Debet		4.596.157.812
- Beban Persediaan Suku Cadang	805.718.683	
- Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	3.221.075.849	
- Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	201.758.917	
- Belanja Modal teridentifikasi pemeliharaan	367.604.363	
Penyesuaian Kredit		2.656.079.593
a. Belanja Persediaan Untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.241.452.580	
b. Belanja Persediaan Untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135.994.100	
c. Belanja Persediaan Untuk Pemeliharaan Jaringan	259.220.500	
d. Pembayaran Tunggakan 2017	19.412.413	
Saldo Beban Pemeliharaan TA 2018		146.932.372.972

Beban Perjalanan Dinas
Rp956.260.502.667,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp956.260.502.667,00 dan Rp845.509.106.977,00.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	626.063.172.945	528.407.467.668	18,48%
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	330.197.329.722	317.101.639.309	4,13%
Jumlah	956.260.502.667	845.509.106.977	13,10%

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp2.425.714.500,00

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp2.425.714.500,00 dan Rp3.687.054.250,00.

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan bagian dari komitmen dan akuntabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada masyarakat yang ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat. Beban tersebut terdiri atas penyerahan majalah dan buletin parlementaria, serta penyerahan souvenir kepada pelajar dan delegasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan kunjungan ke gedung DPR RI.

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp170.248.725.968,00

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp170.248.725.968,00 dan Rp152.158.895.731,00.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, terdapat perubahan atas saldo akumulasi penyusutan aset tetap yang disebabkan oleh:

1. Pengurangan beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp18.268.906,00 akibat koreksi audit berupa reklasifikasi dari peralatan dan mesin kepada lisensi.
2. Pengurangan beban penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp615,178,640,00 akibat koreksi audit berupa koreksi pencatatan gedung nusantara V yang semula dicatat DPR, dialihkan untuk dicatat MPR. Pengurangan beban penyusutan ini dilakukan untuk menghilangkan transaksi penyusutan reguler semester II atas koreksi pencatatan tersebut.
3. Penambahan beban penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp636.755.700,00 akibat koreksi audit berupa pencatatan kembali gedung nusantara V yang semula dihapuskan pada transaksi takeout reval. (Lihat penjelasan pada bagian gedung dan bangunan).
4. Penambahan beban Amortisasi Software sebesar Rp13.475.000,00. Penambahan tersebut akibat koreksi audit BPK berupa belanja barang yang teridentifikasi membentuk software.
5. Penambahan beban Amortisasi Software sebesar Rp6.067.875,00. Penambahan tersebut akibat koreksi audit BPK berupa belanja barang yang teridentifikasi membentuk software.
6. Penambahan beban Amortisasi Software sebesar Rp6.038,750,00. Penambahan tersebut akibat koreksi audit BPK berupa belanja barang yang teridentifikasi membentuk software.
7. Penambahan beban Amortisasi Lisensi sebesar Rp9.134.440,00. Penambahan tersebut akibat koreksi audit BPK berupa belanja modal peralatan dan mesin yang teridentifikasi membentuk lisensi.

Selain itu, terdapat pengurangan Beban penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.111.049,00 akibat koreksi atas transaksi takeout revaluasi sesuai dengan S-182/PB/2019. Atas transaksi ini, telah dilakukan koreksi pada satker konsolidasi.

Rincian Beban Penyusutan setelah koreksi disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	135.887.042.808	119.780.578.314	13,45%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.300.462.780	26.545.873.304	2,84%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.499.414.168	3.565.301.336	26,20%
Beban Amortisasi Software	1.547.262.067	1.450.081.022	100%
Beban Amortisasi Lisensi	547.951.653	383.760.656	100%
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi	466.592.492	433.301.099	7,68%
Jumlah	170.248.725.968	152.158.895.731	11,89%

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp199.580.207,00

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp199.580.207,00 dan Rp139.407,00.

Terdapat penambahan jumlah penyisihan piutang sebesar Rp453.750,00 jika dibandingkan dengan saldo unaudited sebesar Rp14.922.155,00. Penambahan tersebut disebabkan adanya penambahan jumlah piutang lainnya akibat adanya belanja persediaan yang belum dilakukan serah terima barang sampai dengan tanggal pelaporan.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Surplus/Defisit Dari
Kegiatan Non Operasional
Rp3.186.205.087,00

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp3.186.205.087,00 dan Rp3.197.042.437,00.

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional setelah koreksi disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember 2018	Realisasi s.d 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
SURPLUS/DEFISIT DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR	1.694.984.001	620.122.013	173,33%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	1.491.221.086	2.576.920.424	-42,13%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3.186.205.087	3.197.042.437	-0,34%

Angka surplus/defisit dari pelepasan aset non lancar merupakan angka netto dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dan Beban Pelepasan Aset Non lancar. Selama TA 2018, DPR RI memiliki pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp1.778,506,408,00. Seluruh pendapatan dari pemindahtanganan BMN diperoleh dari penjualan lelang atas BMN yang sudah tidak dipergunakan dalam operasional perkantoran. Hasil lelang disetorkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan menggunakan Bagian kode Anggaran DPR RI.

Selama tahun anggaran 2018 diakui adanya beban kerugian pelepasan aset sebesar Rp83.522.407,00. Beban kerugian pelepasan aset disebabkan adanya pelepasan atas aset yang masih memiliki nilai residu.

Angka Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional lainnya merupakan angka netto dari pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.

Realisasi Pendapatan Non Operasional TA 2018		1.625.189.367
Penyesuaian Debet		319.280.227
- Pengakuan Ganti Rugi	7.000.000	
- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	415.600	
- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	311.864.627	
Penyesuaian Kredit		323.678.567
- Pengembalian Belanja Pegawai telah dicatat di 2017	323.678.567	
- penyetoran Kelebihan belanja setelah tanggal laporan	-	
Saldo Pendapatan Non Operasional 2018		1.620.791.027

Selama tahun anggaran 2018, diakui adanya Pendapatan Penyesuaian Nilai persediaan

sebesar Rp311.864.627,00. Pendapatan penyesuaian nilai persediaan diakibatkan adanya selisih lebih antara nilai perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir dengan harga perhitungan berdasarkan mutasi persediaan.

Beban dari kegiatan non operasional lainnya selama tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp129.569.941,00. Angka beban ini seluruhnya merupakan angka beban penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp129.569.941,00.

Beban penyesuaian nilai persediaan diakibatkan adanya selisih kurang antara nilai perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir dengan harga perhitungan berdasarkan mutasi persediaan.

E. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1.409.731.081.066,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp1.409.731.081.066,00 dan Rp1.398.950.805.617,00.

Surplus (Defisit) LO -
Rp4.583.110.611.184,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Nilai Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar adalah masing masing sebesar -Rp4.583.110.611.184,00 dan -Rp4.165.806.321.537,00.

Terdapat penambahan atas Surplus (Defisit) LO setelah periode audit yang disebabkan oleh:

- a. Pengurangan beban persediaan akibat ditemukannya barang persediaan dalam gudang senilai Rp632,990,383,00
- b. Pengurangan beban barang dan jasa akibat ditemukannya belanja barang teridentifikasi sebagai persediaan senilai Rp555.500.000,00
- c. Pengurangan beban barang dan jasa akibat ditemukannya belanja barang teridentifikasi sebagai aset senilai Rp204.653.000,00
- d. Pengurangan beban penyusutan akibat koreksi pencatatan ganda gedung nusantara V sebesar Rp615,178,640,00
- e. Pengurangan beban penyusutan akibat reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke lisensi sebesar Rp18.268.906,00
- f. Penambahan beban penyusutan akibat koreksi kembali hasil revaluasi aset sebesar Rp636.755.700,00
- g. Penambahan beban penyusutan akibat reklasifikasi belanja barang yang teridentifikasi membentuk aset senilai Rp34.716.065,00

Selain itu, terdapat pengurangan Beban penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.111.049,00 akibat koreksi atas transaksi takeout revaluasi sesuai dengan S-182/PB/2019. Atas transaksi ini, telah dilakukan koreksi pada satker konsolidasi.

Selain itu, terdapat pengurangan Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.867.648,00 akibat koreksi atas transaksi takeout revaluasi sesuai dengan S-182/PB/2019. Atas transaksi ini, telah dilakukan koreksi pada satker konsolidasi.

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi
Rp660.571.556,00

E.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Nilai koreksi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp660.571.556,00 dan -Rp290.436.539,00.

Terdapat penambahan atas Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi setelah periode audit yang disebabkan oleh:

- a. Pengurangan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi akibat koreksi pencatatan ganda pada gedung nusantara V sebesar Rp25.223.080.849,00
- b. Penambahan nilai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi akibat pencatatan

nilai kembali angka revaluasi sebesar Rp24.833.472.300,00. Pencatatan kembali diperlukan agar nilai gedung tidak minus setelah dilakukan koreksi pencatatan ganda.

- c. Penambahan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi akibat koreksi pencatatan ganda pada gedung nusantara V sebesar Rp1.230.357.280,00. Nilai ini digunakan untuk mengembalikan angka akumulasi penyusutan yang sebelumnya sudah dikurangkan
- d. Penambahan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi akibat transaksi takeout revaluasi sebesar Rp756.599,00

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

No	Uraian Akun	Debet	Kredit
1	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	140.326.881	1.230.357.280
2	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		303.450
3	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.699.282.046	-
4	Gedung dan Bangunan	25.823.215.681	25.396.447.921
5	Jalan dan Jembatan	6.069.008	
6	Peralatan dan Mesin		2.701.599.922
	Total	28.668.893.616	29.328.708.573

Koreksi Lain-lain
Rp302.650.714,00

E.4 Koreksi Lain-lain

Nilai koreksi lain lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp302.650.714 dan -Rp1.040.000.

Koreksi lain lain merupakan koreksi lainnya selain koreksi atas pendapatan dan beban atas kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

No	Uraian Akun	Debet	Kredit
1	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	10.416.661	307.326.600
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		26.040.775
3	Piutang PNBPN	20.300.000	
	Total	30.716.661	333.367.375

Nilai koreksi lainnya selama tahun 2018 antara lain berasal dari koreksi tambah nilai pendapatan diterima dimuka yang kurang catat pada tahun 2017 sebesar Rp10.416.661,00, koreksi atas piutang sewa yang sudah tidak mungkin tertagih karena penutupan warung sebesar Rp20.300.000,00 dan koreksi yang diakibatkan adanya pelunasan piutang yang telah dihapuskan sebelumnya sebesar Rp950.000,00

Transaksi Antar Entitas -
Rp4.594.514.742.134,00

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp4.594.514.742.134,00 dan Rp4.176.878.073.525,00.

Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

No	Uraian Akun	Koreksi
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	(4.603.672.520.480)
2	Diterima dari Entitas Lain	9.157.778.346

Total	(4.594.514.742.134)
--------------	----------------------------

E.6 Ditagihkan Ke Entitas Lain / Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN)

Nilai Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah masing masing sebesar - Rp4.603.672.520.480,00 dan Rp9.157.778.346,00.

Ekuitas Akhir
Rp1.422.098.434.286,00

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan DPR RI Nomor NKF-002/73/PB.6/2019 adalah masing masing sebesar Rp1.422.098.434.286,00 dan Rp1.409.731.081.066,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Berdasarkan Surat Nomor PW/18432/DPR RI/09/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Permohonan Pendelegasian Wewenang, disebutkan bahwa berdasarkan keputusan rapat Pimpinan DPR RI tanggal 26 September 2017, per 1 Oktober 2017 Ibu Dra. Damayanti, M.Si diangkat sebagai pelaksana tugas sehari-hari Sekretaris Jenderal DPR RI. Bapak Achmad Djuned, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Jenderal DPR RI memasuki masa purna bhakti terhitung mulai 1 Oktober 2017.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49/TPA Tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, mengangkat Ir. Indra Iskandar, M.Si (NIP. 19661114 199703 1 001) sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI sejak saat pelantikan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, Hasil revaluasi seharusnya disajikan pada laporan keuangan tahun 2018. Namun sesuai surat dengan surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara, maka hasil penilaian kembali BMN tahun 2017 - 2018 tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2018. Hasil Penilaian Kembali BMN akan disajikan setelah perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK. :

Atas kebijakan tersebut, terdapat perbedaan penyajian nilai aset tetap objek revaluasi pada laporan BMN dan Laporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Akun	Menurut LK	Menurut LBMN
1	Tanah	188.409.157.000	1.073.370.956.905
2	Gedung dan Bangunan	907.534.052.443	839.172.383.296
3	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	188.580.554.347	380.822.009.715

Lampiran I

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017

NO	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017	Nilai Buku per 31 Desember 2017
A	Tanah		188.409.157.000	0	0	188.409.157.000
1	Tanah Persil		188.409.157.000	0	0	188.409.157.000
B	Peralatan dan Mesin		1.188.424.521.149	713.339.188.584	804.093.379.649	384.331.141.500
1	Alat Bantu	7	42.208.380.858	32.213.139.000	34.856.979.302	7.351.401.556
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	100.835.070.167	47.137.123.739	54.564.302.362	46.270.767.805
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	1.630.314.976	1.388.402.112	1.582.091.540	48.223.436
4	Alat Bengkel Bermesin	10	16.302.994.364	13.417.997.971	14.405.089.881	1.897.904.483
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	1.297.707.255	772.081.551	905.524.094	392.183.161
6	Alat Ukur	5	1.371.067.172	783.505.159	957.289.535	413.777.637
7	Alat Pengolahan	4	2.107.773.973	1.099.497.729	1.517.559.243	590.214.730
8	Alat Kantor	5	208.103.432.141	142.731.114.390	157.492.359.201	50.611.072.940
9	Alat Rumah Tangga	5	396.600.408.592	267.781.718.716	281.707.396.205	114.893.012.387
10	Alat Studio	5	143.874.838.780	49.162.485.747	68.880.120.905	74.994.717.875
11	Alat Komunikasi	5	19.006.894.356	13.463.487.214	15.061.886.516	3.945.007.840
12	Peralatan Pemancar	10	16.655.602.260	5.411.755.932	6.803.796.267	9.851.805.993
13	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	97.900.000	29.369.920	35.896.600	62.003.400
14	Alat Kedokteran	5	14.698.597.417	7.680.845.524	9.593.897.374	5.104.700.043
15	Alat Kesehatan Umum	5	9.831.008.000	6.467.226.899	8.394.029.233	1.436.978.767
16	Unit Alat laboratorium	8	10.253.490.966	7.702.459.309	8.546.866.899	1.706.624.067
17	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	5.519.626.388	2.308.398.599	2.666.221.270	2.853.405.118
18	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	4.144.347.376	2.181.893.846	2.458.143.132	1.686.204.244
19	Alat Proteksi Radiasi /Proteksi Lingkungan	10	202.883.792	112.410.902	132.699.322	70.184.470
20	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10	977.020.000	977.020.000	977.020.000	0
21	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	1.696.361.500	1.485.160.213	1.625.961.071	70.400.429
22	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	15	5.762.649.014	2.152.723.186	2.519.815.029	3.242.833.985
23	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	180.259.612	29.078.321	47.104.283	133.155.329
24	Senjata Api	10	229.998.200	223.248.200	229.998.200	0
25	Persenjataan Non Senjata Api	3	998.007.547	606.095.779	802.605.765	195.401.782
26	Alat Khusus Kepolisian	4	935.580.582	226.651.630	456.021.112	479.559.470
27	Komputer Unit	4	75.787.061.958	52.573.436.361	60.977.833.794	14.809.228.164
28	Peralatan Komputer	4	75.876.428.269	47.843.594.893	57.413.324.346	18.463.103.923
29	Alat Eksplorasi Topografi	5	3.025.000	3.025.000	3.025.000	0
30	Alat Eksplorasi Geofisika	10	1.119.237.626	429.063.455	540.987.209	578.250.417
31	Pengolahan dan Pemurnian	15	103.485.000	97.188.198	100.336.599	3.148.401
32	Alat Pelindung	5	4.560.584.700	278.878.096	986.684.426	3.573.900.274
33	Alat SAR	2	454.841.240	294.694.609	448.377.215	6.464.025
34	Alat Kerja Penerbangan		20.493.355.731	1.277.783.571	3.106.625.798	17.386.729.933
35	Unit Peralatan Proses /Produksi	8	1.216.888.692	271.139.625	420.172.144	796.716.548
36	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7	2.000.135.145	1.696.439.187	1.760.761.374	239.373.771
37	Peralatan Olahraga	3	1.287.262.500	1.029.054.001	1.114.577.403	172.685.097
C	Gedung dan Bangunan		885.368.481.115	135.554.504.605	162.370.878.565	722.997.602.550
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	830.243.409.822	127.452.344.332	152.733.229.451	677.510.180.371
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	44.049.841.827	7.256.192.688	8.563.923.853	35.485.917.974
3	Tugu/Tanda Batas	50	11.075.229.466	845.967.585	1.073.725.261	10.001.504.205
D	Jalan dan Jembatan		25.684.738.329	16.199.491.671	17.752.539.170	7.932.199.159
1	Jalan	10	23.273.373.349	15.886.014.229	17.390.834.428	5.882.538.921
2	Jembatan	50	2.411.364.980	313.477.442	361.704.742	2.049.660.238

Lampiran I

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017

NO	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017	Nilai Buku per 31 Desember 2017
E	Irigasi		4.739.963.560	779.562.213	987.567.551	3.752.396.009
3	Bangunan Air Irigasi	50	663.830.000	68.221.058	81.497.658	582.332.342
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	1.269.391.110	183.603.867	209.531.349	1.059.859.761
5	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	50	1.309.988.450	224.216.973	350.023.043	959.965.407
6	Bangunan Air Bersih/Air Baku		174.800.000	2.185.000	6.555.000	168.245.000
7	Bangunan Air Kotor	50	1.321.954.000	301.335.315	339.960.501	981.993.499
F	Jaringan		55.225.173.988	15.099.306.826	16.903.555.325	38.321.618.663
8	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30	7.069.481.009	1.741.455.208	2.023.354.185	5.046.126.824
9	Instalasi Air Kotor	30	8.512.069.367	2.092.722.340	2.430.631.440	6.081.437.927
10	Instalasi Pembangkit Listrik	40	3.892.424.000	844.738.818	977.246.874	2.915.177.126
11	Instalasi Gardu Listrik	40	5.455.441.800	811.114.036	947.500.077	4.507.941.723
12	Instalasi Pengaman	20	746.238.261	242.527.432	279.839.346	466.398.915
13	Instalasi Lain	5	6.511.360.954	5.722.618.300	5.982.446.351	528.914.603
14	Jaringan Air Minum	30	475.088.000	150.444.531	166.280.797	308.807.203
15	Jaringan Listrik	40	20.795.962.099	3.021.545.493	3.536.563.617	17.259.398.482
16	Jaringan Telepon	20	1.718.901.228	466.516.492	552.461.554	1.166.439.674
17	Jaringan Gas		48.207.270	5.624.176	7.231.084	40.976.186
G	Aset Tetap Dalam Renovasi		14.986.653.857	0	0	14.986.653.857
1	Tanah Dalam Renovasi		14.986.653.857	0	0	14.986.653.857
H	Aset Tetap Lainnya		4.251.538.222	0	0	4.251.538.222
1	Bahan Perpustakaan Tercetak		3.861.153.522	0	0	3.861.153.522
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan bentuk mikro		1.663.000	0	0	1.663.000
3	Kartografi, naskah dan lukisan		56.551.000	0	0	56.551.000
4	Barang Bercorak Kesenian		81.185.700	0	0	81.185.700
5	Alat Bercorak Kebudayaan		250.985.000	0	0	250.985.000
I	ASET TAK BERWUJUD		41.851.828.145	18.414.853.441	20.248.695.119	21.603.133.026
1	Software		24.784.545.582	18.069.363.691	19.519.444.713	5.265.100.869
2	Lisensi		4.709.250.000	345.489.750	729.250.406	3.979.999.594
3	Hasil Kajian/Penelitian		9.499.779.000	0	0	9.499.779.000
4	Aset Tak Berwujud Lainnya		2.858.253.563	0	0	2.858.253.563
J	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan		14.625.737.226	3.546.257.475	5.846.076.518	8.779.660.708
1	Alat Angkutan Darat Bermotor		163.048.328	290.945.128	163.048.328	0
2	Alat Kantor		1.465.343.679	112.024.504	1.465.343.679	0
3	Alat Rumah Tangga		142.489.368	0	137.671.368	4.818.000
4	Alat Studio		395.175.000	395.175.000	395.175.000	0
5	Peralatan Komputer		507.809.839	0	507.483.092	326.747
6	Bangunan Gedung Tempat Kerja		3.173.124.912	549.097.565	632.038.149	2.541.086.763
7	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		8.778.746.100	2.199.015.278	2.545.316.902	6.233.429.198
	Jumlah		2.423.567.792.591	902.933.164.815	1.028.202.691.897	1.395.365.100.694

Lampiran II : Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

No	KDP	Satker	No Kontrak	Nilai Kontrak	% Pnyles.	Nilai KDP	Sumber Dana
1	Peralatan dan Mesin	001012	-	35.661.000	Batal	-	Rupiah Murni
2	Peralatan dan Mesin	001012	-	13.370.000	100%	-	Rupiah Murni
3	Peralatan dan Mesin	001012	-	7.980.000	100%	-	Rupiah Murni
4	Peralatan dan Mesin	001012	-	7.980.000	100%	-	Rupiah Murni
5	Peralatan dan Mesin	001012	-	6.850.000	100%	-	Rupiah Murni
6	Peralatan dan Mesin	001012	-	68.501.440.500	100%	-	Rupiah Murni
7	Peralatan dan Mesin	001012	-	43.930.000	100%	-	Rupiah Murni
	Peralatan dan Mesin	001012	-	3.685.130.000	100%	-	Rupiah Murni
	Peralatan dan Mesin	001012	-	3.099.048.291	100%	-	Rupiah Murni
8	Gedung dan Bangunan	001012	-	36.388.000	Batal	-	Rupiah Murni
9	Gedung dan Bangunan	001012	-	66.422.400	Batal	-	Rupiah Murni
10	Gedung dan Bangunan	001012	-	32.912.000	Batal	-	Rupiah Murni
11	Gedung dan Bangunan	001012	-	46.593.000	Batal	-	Rupiah Murni
12	Gedung dan Bangunan	001012	-	29.191.000	Batal	-	Rupiah Murni
13	Gedung dan Bangunan	001012	-	46.532.000	Batal	-	Rupiah Murni
	Gedung dan Bangunan	001012	-	11.080.204.860	100%	-	Rupiah Murni
14	Jalan, Irigasi dan Jaringan	001012	-	36.212.000	Batal	-	Rupiah Murni
Jumlah				86.775.845.051		-	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN DAN KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN

No	Kode Satker	Nama Satker	Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Daftar Saldo Kas Lainnya di KL
1	001012	Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-
2	001030	Dewan	-	-
		Jumlah	-	-